



# MENDANAI UNTUK MENUNDA

Lembaga Keuangan, Korporasi, dan Individu  
yang Berpotensi Menghambat Transisi  
Energi Bersih yang Berkeadilan

2024



# Mendanai untuk Menunda

Lembaga Keuangan, Korporasi, dan Individu  
yang Berpotensi Menghambat Transisi  
Energi Bersih yang Berkeadilan



- Dipublikasikan oleh** : Indonesia Corruption Watch, (Juni 2024)
- Alamat** : Jl. Kalibata Timur IV/D No.6, Jakarta Selatan, 12740
- Website** : <https://antikorupsi.org/>
- Tim Penulis** : Yassar Aulia  
Meidella Syahni  
Zakki Amali  
Egi Primayogha  
Seira Tamara
- Periset** : Fadilla Miftahul
- Desain dan Tata Letak** : Agustinus Wibi Arya

**#BERSIHKAN  
INDONESIA**

Laporan ini merupakan kolaborasi antara Indonesia Corruption Watch dengan Trend Asia. Untuk pertanyaan lanjutan atau umpan balik terkait laporan ini, silakan hubungi kami via email di [icw@antikorupsi.org](mailto:icw@antikorupsi.org).

# Daftar Isi

<b>Temuan Kunci</b>	<b>03</b>
<b>Pendahuluan</b>	<b>05</b>
<b>Metodologi</b>	<b>10</b>

---

<b>Politik Pembiayaan Energi Kotor</b>	<b>15</b>
1. Potret Umum Pembiayaan Perusahaan Batu Bara	16
2. <i>Just Energy Transition Partnership (JETP)</i>	19
3. Utak-Atik Taksonomi Hijau & Potensi <i>Regulatory Capture</i>	20

---

<b>Perusahaan-Perusahaan Batu Bara Terbesar di Indonesia dan Sumber Pembiayaannya</b>	<b>27</b>
1. Penguasa Hulu-Hilir Bisnis Kotor	<b>29</b>
a. Adaro	29
b. Sinar Mas	30
c. TBS Energi Utama	31
d. Indika Energy	32
e. Barito Pacific	33
2. Pemberi Dana Perusahaan Batu Bara di Indonesia	34
a. Adaro Energy Indonesia (Pinjaman Bank Nasional untuk Proyek Smelter Aluminium)	34

b. Bumi Resources	35
c. Dian Swastatika Sentosa (DSSA)	37
d. Bayan Resources	39
e. Indika Energy (termasuk Multi Tambang Jaya Utama)	40
f. TBS Energi Utama	41

---

**Kelompok 1% Di Balik Raksasa-Raksasa Batu Bara Indonesia** **43**

1. Adaro	45
2. Bumi Resources	46
3. DSSA (Sinar Mas)	47
4. Bayan Resources	48
5. Indika Energy dan Multi Tambangjaya Utama	49
6. TBS Energi Utama	50

---

**Kesimpulan & Rekomendasi** **51**

**Lampiran** **54**

Rincian Daftar Akta Perusahaan (Profil) yang Dirujuk Pada Laporan Ini	55
---	----



# Temuan Kunci

- 01** Dalam kurun waktu 2020–2023, sedikitnya **Rp163 triliun** (Rp163.930.132.583.916) dialirkan oleh lembaga keuangan (dalam bentuk pinjaman proyek, pinjaman korporasi, maupun pinjaman sindikasi) untuk menopang kegiatan industri terkait batu bara di Indonesia. Sangat mungkin total angka sebenarnya jauh lebih tinggi. Salah satu sebabnya, angka tersebut baru hanya merujuk pada laporan tahunan dari 6 (enam) grup perusahaan batu bara terbesar di Indonesia.
- 02** Bank Mandiri menjadi lembaga keuangan yang menduduki peringkat pertama sebagai pemberi dana terbesar untuk industri terkait batu bara. Melalui pinjaman yang tercatat dalam laporan tahunan 6 (enam) grup perusahaan batu bara saja, dalam kurun waktu 2020–2023, BUMN ini telah menyalurkan sedikitnya **Rp66 triliun** (Rp66.928.644.252.330). Angka sebenarnya sangat mungkin lebih tinggi. Salah satu sebabnya, angka tersebut belum menghitung pinjaman yang diberikan oleh Bank Mandiri dalam bentuk pinjaman sindikasi.
- 03** Pada urutan kedua, Bank Rakyat Indonesia (BRI), salah satu BUMN Indonesia, menduduki peringkat kedua sebagai pemberi dana terbesar untuk industri batu bara. Melalui pinjaman yang tercatat dalam laporan tahunan 6 (enam) grup perusahaan batu bara saja, dalam kurun waktu 2020–2023, BRI telah menyalurkan sedikitnya **Rp23 triliun (Rp23.416.686.915.210)**. Angka sebenarnya sangat mungkin lebih tinggi. Salah satu sebabnya, angka tersebut belum menghitung pinjaman yang diberikan oleh BRI dalam bentuk pinjaman sindikasi.

# 04

Dari 6 (enam) perusahaan batu bara yang ditelusuri oleh laporan ini, PT Dian Swastatika Sentosa (DSSA)–bagian dari Sinar Mas, menjadi perusahaan batu bara yang menerima total uang terbesar dari lembaga keuangan. Berdasarkan laporan tahunan DSSA pada kurun waktu 2020–2022 saja, sedikitnya DSSA menerima pinjaman (termasuk dalam bentuk pinjaman sindikasi) sedikitnya **Rp63 triliun** (Rp63.458.619.187.570).

# 05

Di balik industri batu bara Indonesia, tidak hanya bertengger individu-individu terkaya yang masuk ke dalam kategori populasi 1% yang menguasai 30% total kekayaan penduduk Indonesia maupun kelompok oligarki saja. Lebih dari itu, terdapat individu-individu yang membawa risiko tersendiri akibat statusnya sebagai *politically exposed person* ataupun karena pernah tercatat dalam *Offshore Leaks*. Nama yang tercatat dalam *Offshore Leaks* umumnya adalah mereka yang terafiliasi dengan perusahaan di negara suka pajak (*tax haven*). Laporan ini menemukan bahwa dari 7 (tujuh) perusahaan batu bara saja, terdapat sedikitnya 89 individu yang merupakan *politically exposed person*, dan terdapat sedikitnya 45 individu yang namanya pernah tercantum dalam *Offshore Leaks*.

# 06

Transisi energi bersih yang berkeadilan di Indonesia terancam serius akan sulit untuk tercapai dalam kurun waktu yang cepat. Sebab, ekosistem politik, hukum, maupun ekonomi yang dibangun justru cenderung berpihak pada kepentingan industri batu bara semata. Terdapat indikasi kuat bahwa *regulatory capture* telah terjadi di sektor energi. Ini mengakibatkan maraknya praktik *greenwashing* maupun penundaan aksi iklim yang konkret (*climate delay*) oleh pemerintah dan pihak swasta.



# Pendahuluan

Bumi tengah dihadapkan dengan krisis iklim yang berada pada tren yang kian memburuk. Meningkatnya suhu bumi rata-rata 0,08°C per dekade sejak 1880 dan tercatatnya 2022 sebagai tahun terpanas keenam yang tercatat berdasarkan data suhu *The National Oceanic and Atmospheric Administration* Amerika Serikat. Kondisi itu menegaskan trayektori peradaban sedang menuju *Sixth Mass Extinction* (kepunahan massal keenam).<sup>1</sup> Selaras dengan laporan *International Panel on Climate Change* (IPCC) Persatuan Bangsa-Bangsa pada tahun 2019, kenaikan suhu bumi yang trennya mendekati suhu 1,5°C akan memiliki dampak yang apokaliptik, mulai dari hilangnya keanekaragaman hayati, pulau dan kota pesisir karena naiknya permukaan laut, panas ekstrim yang mematikan, hingga kekurangan makanan dan air.<sup>2</sup> Semuanya akan memaksa banyak penduduk mengungsi dan berpotensi menjadi pengungsi iklim—fenomena yang sudah menjadi realita bagi sejumlah negara, salah satunya Pakistan.<sup>3</sup> Bahkan, sebagai bentuk respons terhadap bagaimana suhu di seluruh dunia telah mencapai rekor terpanas sepanjang masa pada tahun 2023, Sekretaris Jenderal Perserikatan

---

1 NOAA National Centers for Environmental Information, "Monthly Global Climate Report for Annual 2022," Januari 2023, diakses 15 Juni 2023 dari <https://www.ncei.noaa.gov/access/monitoring/monthly-report/global/202213>.

2 Intergovernmental Panel on Climate Change, *Global warming of 1,5°C: An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty*, 2019, Cambridge: Cambridge University Press.

3 Nurayn Khan, "The Burden of Climate Injustice: The Catastrophic Floods in Pakistan," Februari 2023, diakses 15 Juni 2023 dari <https://harvardpolitics.com/climate-injustice-pakistan/#:~:text=Pakistan%20is%20facing%20its%20worst,to%20their%20annihilated%20home%20areas>.

Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres mendeklarasikan bahwa bumi sudah tidak lagi berada pada era pemanasan global (*global warming*), melainkan telah masuk pada era "pendidihan global" (*global boiling*).<sup>4</sup>

Sengkarut persoalan di atas sesungguhnya tidak muncul dari ruang hampa atau merupakan fenomena "alamiah." Justru sebaliknya, kerusakan iklim dan ekologi, serta konsentrasi gas rumah kaca CO<sub>2</sub> yang memanaskan di atmosfer yang telah meningkat sebesar 45% sejak Revolusi Industri, merupakan dampak langsung dari pola ekstraktif yang mengakar dalam aktivitas industri-industri yang intensif membakar bahan bakar fosil untuk menghasilkan listrik.<sup>5</sup> Aktivitas tersebut secara bersamaan merampas "penyerap karbon" penting dari bumi dengan memabat hutan secara masif.<sup>6</sup>

Sektor energi merupakan penghasil emisi terbesar dibanding sektor-sektor lainnya dan bertanggung jawab atas sekitar 40% dari total emisi CO<sub>2</sub> global yang berkaitan dengan energi.<sup>7</sup> Pada tahun 2023, emisi dari sektor energi secara global meningkat 1% dari 2022 dan menyentuh rekor tertingginya pada angka 14,153 juta ton CO<sub>2</sub>.<sup>8</sup> Menurut catatan Ember, sebuah think tank yang berfokus di isu transisi energi, sepuluh penghasil emisi CO<sub>2</sub> teratas yang bertanggung jawab untuk menghasilkan 80% emisi global dari sektor energi adalah: Republik Rakyat Tiongkok, Amerika Serikat, India, Uni Eropa, Jepang, Rusia, Korea Selatan, Arab Saudi, **Indonesia**, dan Iran.<sup>9</sup>

Secara lebih spesifik, pembangkit listrik tenaga batu bara merupakan salah satu penyumbang emisi terbesar. Di benua Asia saja, pembangkit listrik tenaga batu bara menyumbang 7,62 Gt dari 8,26 Gt total emisi di Asia.<sup>10</sup> Pada gilirannya, sumber energi terkotor ini menjadi kontributor utama yang mempercepat krisis iklim di planet ini.

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil batu bara terbesar di dunia.<sup>11</sup> Pada tahun 2022 saja, *operating coal capacity* Indonesia meningkat 3% dari 39,4 GW menjadi 40,6 GW (peningkatan 60% dari tahun 2015 yang berada pada angka 25,4 GW).<sup>12</sup> Kemudian, apabila merujuk Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021–2030, Indonesia merencanakan ekspansi terhadap pembangkit listrik tenaga batu bara

---

4 United Nations, "Hottest July ever signals 'era of global boiling has arrived' says UN chief," diakses 9 Juni 2024 dari <https://news.un.org/en/story/2023/07/1139162>.

5 Extinction Rebellion, "Why We Rebel?," diakses 15 Juni 2023 dari <https://rebellion.global/why-rebel/>.

6 *Ibid.*

7 Ember, *Global Electricity Review 2023*, April 2023, United Kingdom: Ember, hlm. 68.

8 Ember, *Global Electricity Review 2024*, Mei 2024, United Kingdom: Ember, hlm. 66.

9 Ember, *Global Electricity Review 2023*, *Loc.Cit.*

10 Ven Venkatachalam, "Global emissions from coal plants: Coal remains the primary fuel for global electricity generation, particularly in Asian countries," *Canadian Energy Centre*, 28 November 2023, diakses 9 Juni 2024 dari <https://shorturl.at/yVQjl>.

11 International Energy Agency, "Coal Information: Overview," diakses 9 Juni 2024 dari <https://www.iea.org/reports/coal-information-overview/production>.

12 Global Energy Monitor, *et.al.*, "Boom and Bust Coal 2023: Tracking the Global Coal Plant Pipeline," April 2023, diakses 15 Juni 2023 dari <https://globalenergymonitor.org/wp-content/uploads/2023/03/Boom-Bust-Coal-2023.pdf>, hlm. 31.

demikian mencapai total 40,6 GW kapasitas tambahan pada tahun 2030.<sup>13</sup> Sebesar 13,8 GW kapasitas untuk pembangkit listrik tersebut akan bersumber dari batu bara.<sup>14</sup> Per Juli 2023, ekspansi sebesar 14,4 GW kapasitas pembangkit listrik tenaga batu bara baru telah diusulkan untuk kebutuhan listrik pelaku industri semata (*captive use atau off-grid*).

Mirisnya, fakta di atas jelas berseberangan dengan setumpuk komitmen internasional seperti *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* ("*Paris Agreement*") yang diadopsi oleh 196 negara—termasuk Indonesia, pada tahun 2015 ataupun rekomendasi dari laporan IPCC pada tahun 2018. Bahwa untuk menahan kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2°C di atas tingkat pada masa pra-industrialisasi dan melanjutkan upaya untuk menekan kenaikan suhu ke 1,5°C di atas tingkat pra-industrialisasi, pembangkit listrik berbahan bakar batu bara perlu dikurangi hingga 78% pada tahun 2030.<sup>15</sup> Laporan *International Energy Agency* di tahun 2021 juga menegaskan bahwa tidak ada pembangkit listrik batu bara atau tambang batu bara baru yang boleh dikembangkan jika ingin mencapai ambisi net zero di tahun 2050.<sup>16</sup>

Indonesia masih sangat bergantung dengan batu bara, sekalipun terdapat sengkaret masalah yang mengiringi industri ini selain dari kerusakan alam. Sebut saja misalnya isu transparansi; korupsi sistemik akibat transaksi kotor dengan para pejabat publik yang menggadaikan perizinan lingkungan; pembajakan oligarki batu bara terhadap fungsi-fungsi kontrol negara (*state capture*); hingga konflik kepentingan ataupun rangkap jabatan dari para pejabat publik atau legislator dengan sektor ekstraktif yang tidak jarang berujung pada *regulatory capture*.<sup>17</sup> Ketergantungan tersebut salah satunya dapat dilihat dari bauran energi primer pembangkit listrik Indonesia yang pada 2022 saja mayoritasnya (sebanyak 67,21%) masih berasal dari batu bara.<sup>18</sup> Ironisnya, angka tersebut justru meningkat dari 2021, di mana bauran energi primer pembangkit listrik dari batu bara berada pada 66%. Sedangkan, bauran energi baru terbarukan (EBT) hanya mencapai 14,11% pada 2022.

Alasan mengapa industri batu bara di Indonesia tetap dapat menggurita meski kerap mendapatkan penolakan masif karena dampaknya terhadap krisis iklim haruslah dikaitkan dengan kontribusi dari lembaga keuangan seperti bank. Salah satu bentuk kontribusi

---

13 Centre for Research on Energy and Clean Air dan Global Energy Monitor, "Emerging captive coal power: Dark clouds on Indonesia's clean energy horizon," September 2023, diakses 9 Juni 2024 dari [https://globalenergymonitor.org/wp-content/uploads/2023/09/CREA\\_GEM\\_Indonesia-Captive\\_2023.pdf](https://globalenergymonitor.org/wp-content/uploads/2023/09/CREA_GEM_Indonesia-Captive_2023.pdf), hlm. 2.

14 *Ibid.*, hlm. iii.

15 Urgewald, "Global Coal Exit List 2022," diakses 15 Juni 2023 dari <https://www.coalexit.org/>.

16 International Energy Agency, "Net Zero by 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector," Oktober 2021, diakses 15 Juni 2023 dari [https://iea.blob.core.windows.net/assets/deebef5d-0c34-4539-9d0c-10b13d840027/NetZeroBy2050-ARoadmapfortheGlobalEnergySector\\_CORR.pdf](https://iea.blob.core.windows.net/assets/deebef5d-0c34-4539-9d0c-10b13d840027/NetZeroBy2050-ARoadmapfortheGlobalEnergySector_CORR.pdf), hlm. 20.

17 Lihat misalnya #BersihkanIndonesia, "Coalruption: Elite Politik dalam Pusaran Bisnis Batu bara," 2018, diakses 15 Juni 2023 dari <https://www.jatam.org/wp-content/uploads/2018/12/COALRUPTION.pdf>.

18 Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sebagaimana dikutip Aulia Mutiara Hatia Putri, CNBC Indonesia, pada "EBT Jauh, Pembangkit Listrik RI Masih Didominasi Batu Bara," <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230523113140-128-439740/ebt-jauh-pembangkit-listrik-ri-masih-didominasi-batu-bara#:~:text=Kementerian%20Energi%20dan%20Sumber%20Daya,67%2C21%25%20pada%202022>.

tersebut misalnya melalui pembiayaan yang mereka berikan setiap tahunnya dalam jumlah yang tidak sedikit. Bentuk pendanaannya bermacam-macam, mulai dari pemberian kredit langsung, *underwriter* (penjamin), maupun pembeli surat utang yang diterbitkan perusahaan batu bara.<sup>19</sup> Secara global, pembiayaan untuk bahan bakar fosil dari 60 bank terbesar di dunia telah mencapai \$5,5 triliun dalam tujuh tahun sejak penerapan *Paris Agreement*, dengan pembiayaan bahan bakar fosil sebesar \$669 miliar pada tahun 2022 saja.<sup>20</sup>

Dari laporan *Global Coal Exit List 2022*, tercatat setidaknya terdapat 70 perusahaan batu bara serta 16 lembaga keuangan nasional dan multinasional di Indonesia yang saling memiliki keterkaitan finansial. Sejumlah perusahaan batu bara Indonesia tersohor masuk dalam daftar, antara lain: PT Bumi Resources Tbk; PT Adaro Energy Indonesia Tbk; PT Indika Energy Tbk; PT Bayan Resources Tbk; PT Sinar Mas; PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) atau yang sekarang dikenal dengan Mining Industry Indonesia (MIND ID); PT Berau Coal Energy Tbk; PT TBS Energi Utama Tbk; dan PT Multi Harapan Utama.

Adapun 16 lembaga keuangan pemegang saham di perusahaan batu bara yang berhasil diidentifikasi oleh 350.org dan Project Multatuli melalui data *Global Coal Exit List 2022* adalah: BPJS Ketenagakerjaan, Asia Merchant Bank, TASPEN, Bank Sinar Mas, Intercipta Sempana, Pool Advista, Pan Arcadia Capital, Indo Premier Securities, Bank Mandiri, Millennium Capital Management, Bank Panin, Sucorinvest Inti Investama, Polaris Investama, Prospera Asset Management, MNC Investama, dan Syailendra. Dalam konteks aliran pendanaan terbesar untuk industri batu bara, empat perbankan nasional yang merupakan tiga bank Bank Usaha Milik Negara (BUMN)–Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan satu bank swasta, Bank Central Asia (BCA) tercatat berperan sebagai penyalur dana untuk industri kotor batu bara.<sup>21</sup>

Tentu, kucuran dana dari berbagai lembaga keuangan seperti bank ke portofolio bisnis energi kotor turut menjadikan mereka aktor yang berkontribusi terhadap krisis iklim. Terlebih, sokongan dana ini berkontradiksi dengan “komitmen hijau” dari masing-masing bank dan berpotensi besar menjadikan komitmen-komitmen tersebut menjadi sebatas *greenwashing* semata.<sup>22</sup> Lebih jauh, masifnya pembiayaan terhadap industri batu bara di Indonesia pada saat masyarakat dunia telah lama mendorong untuk ditinggalkannya sumber energi kotor dapat dimaknai sebagai penghambat dari transisi energi bersih. Segala bentuk upaya untuk menunda aksi-aksi serius dalam transisi energi (yang secara

---

19 Meidella Syahni, Project Multatuli, “Komitmen Berkelanjutan Bank-Bank Indonesia: Menyokong Lingkungan Hidup Sambil Menafkahi Batubara,” April 2022, diakses 15 Juni 2023 dari <https://projectmultatuli.org/komitmen-berkelanjutan-bank-bank-indonesia-menyokong-lingkungan-hidup-sambil-menafkahi-batubara/>.

20 Urgewald, *Loc.Cit.*

21 Meidella Syahni, *Loc.Cit.*

22 Secara sederhana, “*greenwashing*” umumnya merujuk pada praktik manipulasi yang dilakukan suatu entitas (umumnya korporasi) ketika memberikan klaim atau citra bahwa dirinya telah menyelaraskan diri dengan standar-standar keberlanjutan (*sustainability*) namun di saat bersamaan, aktivitas sebenarnya justru dapat dikategorikan bersifat destruktif terhadap lingkungan. Lihat misalnya Marta Pizzetti, *et.al.*, “Firms Talk, Suppliers Walk: Analyzing the Locus of Greenwashing in the Blame Game and Introducing ‘Vicarious Greenwashing’”, *Journal of Business Ethics*, 23 Desember 2019.

karakter butuh untuk dilakukan secepatnya) dapat dikategorikan sebagai bentuk “*climate delay*” atau “*climate delayism*.”<sup>23</sup>

Untuk memahami lebih jauh mengapa *climate delayism* masih prevalen di Indonesia rasanya penting untuk menggunakan lensa ekonomi politik dan mempertimbangkan konteks demokrasi Indonesia yang kental dengan patronase karena dikuasai oleh segelintir elite maupun oligark predatoris (umumnya berasal dari industri ekstraktif seperti batu bara).<sup>24</sup> Dengan demikian, perlu dipetakan aktor-aktor yang kemungkinan besar diduga memiliki kepentingan untuk mempertahankan ketergantungan Indonesia dengan batu bara karena selama ini terhubung dan diuntungkan oleh industri tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, *Indonesia Corruption Watch* (ICW) bersama dengan Trend Asia menyusun laporan ini yang berjudul: **“Mendanai untuk Menunda: Lembaga Keuangan, Korporasi, dan Individu yang Berpotensi Menghambat Transisi Energi Bersih yang Berkeadilan.”**

---

23 Lihat misalnya William F. Lamb, et.al., “Discourses of climate delay,” *Global Sustainability*, Vol. 3, 2020, <https://doi.org/10.1017/sus.2020.13>, hlm. 1–2.

24 Ward Berenschot, “The Political Economy Clientelism: A Comparative Study of Indonesia’s Patronage Democracy,” *Comparative Political Studies*, Vol. 51, No. 12, 2018, hlm. 1569–1570.



# Metodologi

Laporan ini mengambil sampel 7 (tujuh) perusahaan batu bara besar di Indonesia sebagai objek studi dengan mempertimbangkan: luas konsesi, jumlah produksi, kepemilikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), serta latar belakang dari pemilik atau individu yang terhubung dengan perusahaan tersebut. Tujuh perusahaan tersebut antara lain: PT Adaro Energy Indonesia, PT Bumi Resources, PT Dian Swastatika Sentosa, PT Bayan Resources, PT Indika Energy, PT TBS Energi Utama (dulu Toba Bara Sejahtera), dan PT Multi Tambangjaya Utama.

Dari masing-masing perusahaan di atas, laporan ini melakukan penelusuran terhadap setidaknya dua hal: rantai afiliasi dan sumber pendanaan.

Pada laporan ini, "rantai afiliasi" mengacu pada perusahaan maupun individu yang memegang saham sepenuhnya atau sebagian dari tujuh perusahaan yang menjadi objek studi laporan ini secara langsung atau tidak langsung melalui anak-anak perusahaannya maupun melalui perusahaan pemegang saham lainnya.<sup>25</sup> Untuk konteks individu, afiliasi juga dapat berbentuk jabatan direksi maupun komisaris.<sup>26</sup> Berkenaan dengan informasi rantai afiliasi, laporan ini merujuk pada sumber data primer berupa akta perusahaan (profil

---

<sup>25</sup> Dalam laporan ini, penyajian data terkait kepemilikan saham ditampilkan dalam bentuk persentase dengan cara membagi jumlah lembar saham yang dimiliki oleh individu/perusahaan terhadap total jumlah lembar saham yang dijadikan modal ditempatkan oleh perusahaan yang dirujuk.

<sup>26</sup> Ketika ada individu yang memegang jabatan direksi atau komisaris dari sebuah perusahaan tetapi disaat bersamaan juga merupakan pemilik saham, laporan ini hanya akan menyajikan data terkait kepemilikan saham individu yang bersangkutan.

perusahaan) yang diakses dari situs resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (<https://ahu.go.id/>). Mayoritas profil perusahaan yang dirujuk pada laporan ini diakses pada September 2023.<sup>27</sup> Sehingga, seluruh informasi terkait perusahaan yang dikutip pada laporan ini hanya merepresentasikan kondisi pada saat profil diakses. Menjadi sangat mungkin laporan ini tidak dapat mencakup keseluruhan profil perusahaan maupun individu yang terafiliasi ataupun mungkin saja terdapat struktur atau kondisi dari perusahaan yang pada kenyataannya berbeda dari yang dipotret dalam laporan ini.<sup>28</sup> Sebagai pelengkap dari sumber data primer, laporan ini juga memanfaatkan sumber data sekunder ketika menelusuri rantai afiliasi dengan mengacu pada situs resmi perusahaan dan pemberitaan daring.

Berikut rincian total perusahaan dan individu yang ditelusuri rantai afiliasinya pada laporan ini:

Grup	Perusahaan Terafiliasi	Individu
Adaro	11	29
Bumi Resources	22	44
Dian Swastatika Sentosa (Sinar Mas)	23	54
Bayan Resources	13	33
Indika (termasuk Multi Tambangjaya Utama)	25	48
TBS Energi Utama	8	23
<b>Total</b>	<b>102</b>	<b>231</b>

Untuk menelusuri sumber pendanaan dari tujuh perusahaan yang dijadikan objek studi, sumber data diperoleh dari laporan tahunan masing-masing perusahaan dari kurun waktu 2020–2022.<sup>29</sup> Kemudian, diidentifikasi lembaga keuangan serta total pinjaman yang

27 Sejumlah akta perusahaan diakses pada bulan selain September 2023. Rincian lengkapnya dapat dilihat pada bagian “Lampiran” dari laporan ini.

28 Sebagai contoh, pada saat penelusuran rantai afiliasi laporan ini, PT Multi Tambangjaya Utama masih terafiliasi dengan PT Indika Energy melalui kepemilikan saham tidak langsung.

29 Pada saat laporan ini ditulis, belum semua perusahaan belum memublikasikan laporan tahunan

diberikan kepada masing-masing perusahaan sebagaimana tercatat dalam laporan tahunan mereka dari tahun 2020–2022. Namun, untuk PT Adaro Energy Indonesia, laporan tahunan mereka tidak disajikan seperti enam perusahaan lain yang menjadi objek studi. Mereka tidak menampilkan secara rinci lembaga keuangan yang memberikan pinjaman serta berapa nominalnya. Oleh karena itu, laporan ini hanya merujuk total pinjaman sejumlah lembaga keuangan pada tahun 2023 untuk proyek *smelter* aluminium milik Adaro dari sumber data sekunder yang dapat diakses secara terbuka.

Setelah dilakukan penelusuran rantai afiliasi dan sumber pendanaan dari tujuh perusahaan yang dijadikan objek studi, laporan ini hendak mengatribusikan akuntabilitas pada aktor-aktor yang telah terpetakan terhadap komitmennya untuk mendorong transisi energi bersih berkeadilan dan meninggalkan ketergantungan Indonesia terhadap industri batu bara secara konkret dan cepat. Untuk “menagih” pertanggungjawaban atau akuntabilitas tersebut, laporan ini akan merujuk pada konsep *group-level responsibility* dan pemaknaan “*common control*” maupun “*control*” korporasi yang dikembangkan oleh *Greenpeace*<sup>30</sup> dari *Accountability Framework*<sup>31</sup> sejumlah organisasi pembela lingkungan internasional seperti *Meridian Institute* dan *Rainforest Alliance*. Konsep-konsep kunci yang akan diadopsi atau dirujuk oleh laporan ini adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

### **1. Group-level responsibility**

Setiap korporasi berpotensi dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran undang-undang, peraturan, atau kebijakan keberlanjutan yang timbul dari korporasi atau operasi mana pun yang berada di bawah kendali bersama (*common control*), terlepas dari struktur kepemilikan hukum atau nama dagang yang terpisah; dan bahwa setiap sanksi yang dikenakan oleh pemasok, pelanggan, pemberi pinjaman, investor atau lembaga sertifikasi sebagai tanggapan atas pelanggaran tersebut harus diterapkan pada semua perusahaan dan operasi yang berada di bawah pengendalian bersama. Singkatnya, tanggung jawab tingkat grup berlaku: di seluruh grup (yaitu untuk semua perusahaan di bawah kendali yang sama); di semua komoditas dan sektor yang melibatkan kelompok tersebut; dan untuk semua operasi perusahaan grup secara global;

### **2. Corporate group**

Keseluruhan dari badan-badan hukum yang terafiliasi dengan korporasi, baik langsung maupun tidak langsung, dalam suatu jaringan hubungan di mana salah satu pihak mengendalikan tindakan atau kinerja pihak lain, atau yang dikendalikan oleh individu yang sama;

---

mereka untuk 2023. Oleh karenanya, rentang pemantauan di laporan ini berhenti pada tahun 2022.

30 Lihat *Greenpeace, et.al., “Shining Light on the Shadows: Towards a Uniform Methodology for Establishing Common Corporate Control,”* 2023, hlm. 4–10, diakses dari <https://www.greenpeace.org/international/publication/58702/shining-light-on-the-shadows/#comments>.

31 Lihat “*Accountability Framework initiative,*” diakses dari <https://accountability-framework.org/about/about-the-accountability-framework-initiative/who-we-are/>.

32 *Greenpeace, et.al., Loc.Cit.*

### 3. Control

Kekuasaan untuk memastikan bahwa korporasi bertindak sesuai dengan keinginan entitas, atau kemampuan untuk menggunakan pengaruh efektif atas korporasi, baik dengan kepemilikan atau dengan cara lain—langsung atau tidak langsung, formal atau informal. Pengendalian suatu korporasi dapat dimiliki oleh lebih dari satu entitas pengendali (pengendalian bersama), misalnya melalui usaha patungan, atau di mana satu grup mengoperasikan perkebunan yang dimiliki oleh grup lain. “Kontrol” dapat dilakukan dengan satu atau lebih cara berikut:

- a. **Legal ownership:**  
kepemilikan terdaftar secara resmi atau formal atas suatu korporasi/aset lain, atau atas saham suatu korporasi/aset;
- b. **Beneficial ownership:**  
kepemilikan akhir dan/atau kendali atas korporasi/aset lain atau hak untuk mendapatkan keuntungan finansial dari korporasi/aset tersebut;
- c. **Family control:**  
kendali bersama oleh keluarga. Situasi yang terjadi ketika hubungan keluarga dekat terjalin antara pemilik manfaat dari perusahaan yang berbeda, dan perusahaan tersebut dikelola oleh—atau untuk, kepentingan keluarga;
- d. **Management control:**  
kewenangan/kekuasaan suatu kelompok (atau salah satu anggotanya) untuk mengambil keputusan manajemen atas suatu perusahaan;
- e. **Operational control:**  
kewenangan/kekuasaan dari kelompok (atau salah satu anggotanya) untuk mengambil keputusan manajemen atas perusahaan;
- f. **Financial control:**  
segala bentuk skema (selain kepemilikan saham) di mana suatu grup, entitas pengendalinya, atau salah satu anggotanya telah berinvestasi atau mendanai suatu perusahaan sehingga grup tersebut dapat melakukan pengendalian atas perusahaan tersebut. Kontrol keuangan juga dapat diasumsikan ada sebagai hasil dari perjanjian di mana kelompok atau perusahaan adalah pembeli tunggal produk perusahaan lain melalui kontrak atau pengaturan terikat lainnya, dan perusahaan produsen dengan demikian bergantung secara keuangan pada kelompok pembelian atau perusahaan.

Ketika melakukan *profiling* singkat terhadap individu yang telah teridentifikasi melalui metode yang sudah dijelaskan di atas, laporan ini akan mengidentifikasi empat hal dari tiap individu, yakni:<sup>33</sup>

- 1 Afiliasi kekeluargaan dengan individu lain pada perusahaan-perusahaan yang ditelusuri laporan ini;<sup>34</sup>
- 2 Apakah nama yang identik dengan individu tersebut pernah dicatut dalam *offshore leaks*;<sup>35</sup>
- 3 Pernah atau tidak tersangkut kasus hukum;<sup>36</sup> dan
- 4 Apakah individu bersangkutan dapat dikategorikan sebagai *politically exposed person* (PEP).<sup>37</sup>

Pengkategorian ini dilakukan untuk melihat potensi pengaruh yang dimiliki masing-masing individu dalam tiap perusahaan dan risiko-risiko yang mungkin muncul dari keberadaan individu tersebut. Lebih khusus, pengidentifikasian tersebut dapat membantu untuk memperkirakan potensi kepentingan yang dimiliki dari masing-masing individu untuk memengaruhi atau menunda proses transisi energi berkeadilan di Indonesia.

Secara umum, laporan ini juga mengandalkan data sekunder untuk melakukan analisis. Beberapa diantaranya adalah artikel ilmiah, publikasi daring dari lembaga riset atau organisasi internasional, serta pemberitaan media yang kredibel.

33 Sangat mungkin per individu dapat teridentifikasi lebih dari satu kategori.

34 Pada laporan ini, "afiliasi keluarga" mencakup hubungan yang terikat karena relasi langsung maupun tidak langsung. "Relasi langsung" dapat berbentuk hubungan yang timbul akibat relasi darah seperti: bapak, ibu, adik, atau kakak. Sedangkan, "relasi tidak langsung" dapat berbentuk hubungan kekeluargaan yang timbul akibat konsekuensi hukum perkawinan, seperti: mertua, menantu, atau ipar. Afiliasi keluarga hanya disajikan pada laporan ini jika telah terkonfirmasi melalui lebih dari 2 (dua) sumber terbuka yang kredibel.

35 *Offshore leaks* merujuk pada *bank data* yang dihimpun oleh *International Consortium of Investigative Journalists* berisikan informasi dari 810.000 entitas *offshore* yang pernah diungkap dari investigasi *Pandora Papers*, *Panama Papers*, *Paradise Papers*, *Bahamas Leaks*, dan *Offshore Leaks*. Meski tidak serta merta melanggar hukum, perusahaan *offshore* patut dicurigai memiliki risiko yang tinggi karena didirikan di negara-negara suaka pajak (*tax haven*) yang seringkali memiliki rezim informasi yang sangat rahasia (tidak transparan). Terkait informasi lebih lanjut, lihat <https://offshoreleaks.icij.org/>.

36 Pada laporan ini, untuk dapat dikategorikan "Pernah Tersangkut Kasus Hukum," individu tersebut harus teridentifikasi pernah ditetapkan sebagai saksi, tersangka, terdakwa, tergugat, pihak terkait, atau terpidana pada kasus yang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum maupun pada kasus yang sudah diputus pengadilan. Individu yang pernah dilaporkan ke aparat penegak hukum seperti kepolisian juga masuk ke dalam kategori "Pernah Tersangkut Kasus Hukum." Termasuk juga kasus yang telah diberhentikan proses penanganannya tanpa ada putusan pengadilan. Individu yang pernah dipanggil untuk pemeriksaan di luar kasus yang ditangani aparat penegak hukum seperti pemeriksaan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia juga masuk ke dalam kategori "Pernah Tersangkut Kasus Hukum."

37 Untuk menentukan apakah seorang individu masuk ke dalam kategori *politically exposed persons* atau bukan, laporan ini merujuk seutuhnya pada klasifikasi serta standar-standar yang ditetapkan oleh *Financial Action Task Force*. Lebih lengkapnya lihat "FATF Guidance: Politically Exposed Persons (Recommendations 12 and 22)," Juni 2013, diakses pada 10 Juni 2024 dari <https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/guidance/Guidance-PEP-Rec12-22.pdf.coredownload.pdf>.

# Politik Pembiayaan Energi Kotor



# 01

## Potret Umum Pembiayaan Perusahaan Batu Bara

Bisnis energi kotor di Indonesia bisa terus hidup dengan sokongan uang dari sejumlah lembaga keuangan. Industri batu bara umumnya didanai lewat fasilitas kredit perusahaan dan utang. Pembiayaan terbesar diberikan bank Eropa dan Amerika Serikat, meskipun bank-bank di Asia juga memberikan dukungan signifikan. Di hilir, PLTU lebih banyak dibiayai oleh pembiayaan proyek dengan jangka waktu yang lama.

Data Urgewald terbaru menunjukkan, bank komersial menyalurkan \$470 miliar utang untuk industri batu bara antara Januari 2021–Desember 2023.<sup>38</sup> Mayoritas, 92% dari pinjaman ini berasal dari bank di 7 negara: China, Amerika Serikat, Jepang, India, Inggris dan Indonesia. Jumlah ini hanya 20% lebih sedikit dari pinjaman negara-negara ini pada 2016.

Di Indonesia, tiga bank yang memberikan pendanaan terbesar menurut riset Urgewald:<sup>39</sup>

Bank Mandiri	: \$3,1 miliar
Bank Negara Indonesia (BNI)	: \$1,4 miliar
Bank Rakyat Indonesia (BRI)	: \$1,2 miliar

Dari ketiga bank ini, hanya BRI yang menurunkan jumlah pinjamannya sejak 2016. Sementara dua lainnya memberikan pinjaman yang meningkat drastis hingga 2023.

---

38 Lihat Urgewald, "Media Briefing: Commercial Banks Still Deep into Coal 8 Years after Paris," 2 Mei 2024, diakses dari [https://stillbankingoncoal.org/sites/default/files/download\\_public/Urgewald\\_briefing\\_StillBankingonCoal\\_0.pdf](https://stillbankingoncoal.org/sites/default/files/download_public/Urgewald_briefing_StillBankingonCoal_0.pdf).

39 *Ibid.*

Tabel 1: Perbandingan Pembiayaan Batu Bara dari Mandiri, BNI, dan BRI pada 2016 dan 2023<sup>40</sup>

Bank	Pembiayaan Batu Bara 2016 (dalam juta dollar)	Pembiayaan Batu Bara 2023 (dalam juta dollar)	Perubahan Bersih (Net Change)
Bank Mandiri	316	1.480	+368%
Bank Negara Indonesia	145	740	+410%
Bank Rakyat Indonesia	1.929	581	-70%

Sebelumnya, *Global Coal Exit List (GCEL) 2022*, sebuah laporan serupa dari puluhan lembaga non-pemerintah di dunia, mencatat ada 16 lembaga keuangan nasional dan multinasional di Indonesia yang terus mendanai industri batu bara dalam rentang 2019-2021.

Mulai dari BPJS Ketenagakerjaan, TASPEN, bank swasta seperti Asia Merchant Bank, Sinar Mas, Panin, dan sejumlah manajer investasi yakni Intercipta Sempana, Pool Advista, Pan Arcadia Capital, Indo Premier Securities, Millennium Capital Management, Sucorinvest Inti Investama, Polaris Investama, Prospera Asset Management, MNC Investama dan Syailendra.

Laporan lain yang pernah dirilis *Fair Finance Asia* mencatat dalam periode 2016—2020 lembaga keuangan dari Jepang menjadi pemberi pinjaman dan *underwriter* terbesar perusahaan-perusahaan batu bara nasional.<sup>41</sup> Namun pada 2020, sejumlah bank mulai meninggalkan industri batu bara dengan bergabung bersama *Net Zero Banking Alliance*. *UN Environment Programme Finance Initiative* mencatat, 114 bank di 41 negara dengan total aset \$74 triliun atau setara 41% aset bank global, bergabung dengan aliansi ini. Mereka termasuk Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) dan Mizuho Bank dari Jepang; HSBC (Inggris); CIMB (Malaysia); DBS (Singapura); dan ANZ (Australia). Keseluruhannya merupakan bank yang membiayai bisnis batu bara di Indonesia. *The Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA)* juga mencatat lebih dari 100 lembaga keuangan global telah mengumumkan divestasi mereka dari industri batu

40 *Ibid.*

41 Fair Finance Asia, "A Future Without Coal: Banking on Asia's just energy transition," 2021, diakses dari <https://www.responsibank.id/media/ox4o33rw/a-future-without-coal-banking-on-asia-s-just-energy-transition.pdf>.

bara maupun PLTU.<sup>42</sup>

Sayangnya, ketika bank-bank asing mulai punya komitmen nol emisi dan berhenti membiayai industri batu bara, bank domestik dalam negeri justru masih secara aktif mengambil peran membiayai batu bara.

Hasil riset 350.org Indonesia bersama koalisi masyarakat sipil #BersihkanBankmu pada tahun 2022 menemukan bahwa empat bank nasional: Mandiri, BCA, BRI, dan BNI masih memberikan pinjaman kepada perusahaan batu bara di Indonesia. Pinjaman terbanyak diberikan oleh Bank Mandiri hingga \$3,1 miliar, diikuti BCA \$170 juta, BRI \$122 juta, dan BNI \$53 juta. Disadur dari laporan tahunan masing-masing bank, riset tersebut menemukan bahwa sejak tahun 2015—atau dengan kata lain, semenjak Indonesia mengadopsi *Paris Agreement* hingga tahun 2022, total pinjaman langsung yang diberikan keempat bank tersebut mencapai \$3,5 miliar.<sup>43</sup>

Peran bank-bank ini beragam. Mulai dari pemberi pinjaman, *bookrunners*, pembeli awal surat utang, pengatur, agen, sebagai bank rekening, agen jaminan, agen fasilitas. Selain bank BUMN, juga terdapat sejumlah bank swasta di Indonesia yang masih membiayai perusahaan batu bara. Beberapa diantaranya termasuk: Bank Permata, Danamon, DBS Indonesia, Citibank, HSBC Indonesia, Mayapada Internasional, UOB, dan Bank Sinarmas.<sup>44</sup>

Selain itu, lembaga keuangan lain juga masih membiayai perusahaan batu bara, diantaranya: J.P. Morgan Chase Bank Hong Kong, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Toyota Astra Financial Services (TAFS), PT Mandiri Tunas Finance, PT Bank Victoria International, Landesbank Baden-Wuerttemberg, Bank Capital Indonesia, Indonesia Exim Bank, ICICI Bank Limited, MUFG Bank, Bank Mega, The Exim Bank of Korea Jakarta, dan Bank KEB Hana Indonesia.<sup>45</sup>

Selain pemberi pinjaman, bank-bank di atas berperan memberikan fasilitas kredit, tambahan pembiayaan, utang jangka pendek, pembiayaan modal kerja, tambahan fasilitas, fasilitas kredit modal kerja ekspor, pinjaman modal kerja, pinjaman sindikasi, serta perjanjian fasilitas kredit.

Di hilir industri batu bara, sejumlah lembaga keuangan yang memberikan pendanaan untuk ekspansi PLTU yakni Exim Bank of United States, Exim Bank of Korea, Exim Bank

---

42 Lihat The Institute for Energy Economics and Financial Analysis, "Coal Divestment," diakses dari <https://ieefa.org/coal-divestment-1>.

43 Lihat 350.org Indonesia, *et.al.*, "'Stop Burning Our Money!': Laporan Pendanaan Bank Nasional untuk Industri Energi Kotor Batu Bara," diakses dari <https://350.org/id/wp-content/uploads/sites/17/2022/08/Stop-Burning-Our-Money-report.pdf>.

44 Merujuk pada data dari laporan keuangan perusahaan pada kurun waktu 2016–2020. Perlu menjadi catatan bahwa setelah periode tersebut sejumlah bank dan lembaga keuangan sudah memiliki kebijakan internal untuk menghentikan pembiayaan batu bara. Lihat Meidella Syahni, Project Multatuli, "Komitmen Berkelanjutan Bank-Bank Indonesia: Menyokong Lingkungan Hidup Sambil Menafkahi Batubara," *Loc.Cit.* Lihat juga 350.org Indonesia, *et.al.*, "'Stop Burning Our Money!': Laporan Pendanaan Bank Nasional untuk Industri Energi Kotor Batu Bara," *Ibid.*

45 *Ibid.*

of China, Korea Trade Insurance Corporation, Japan Bank for International Cooperation, China Development Bank, Finnvera, Mizuho Bank of Finlandia, Bank of China, Korea Development Bank, Nippon Export and Investment Insurance.<sup>46</sup>

## 02 *Just Energy Transition Partnership (JETP)*

Pada 16 November 2022, saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, Pemerintah Indonesia dan *International Partners Group* (IPG) meluncurkan *Just Energy Transition Partnership* (Kemitraan Transisi Energi yang Adil/JETP). IPG mewakili sejumlah negara yakni Jepang, Amerika Serikat, Kanada, Denmark, Uni Eropa, Jerman, Perancis, Norwegia, Italia, Inggris, dan Irlandia Utara.

Komitmen awalnya, negara-negara ini akan mengucurkan \$20 miliar (sekitar Rp314 triliun) untuk membiayai transisi energi di Indonesia menuju target nol emisi pada 2060. Skema pembiayaannya, \$10 miliar dari dana publik, dan sisanya dari dana swasta yang dikoordinir oleh Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) yang terdiri dari Bank of America, Citi, Deutsche Bank, HBC, Macquire, MUFG, dan Standard Chartered.

Tiga bulan setelah KTT, pada 16 Februari 2023, pemerintah membentuk Sekretariat dan Tim Kerja JETP yang kemudian menyusun *Comprehensive Investment and Policy Plan* (Rencana Investasi dan Kebijakan Komprehensif/CIPP). Sebagai "dokumen hidup," CIPP mendapat banyak kritik dan masukan dari berbagai organisasi masyarakat sipil.<sup>47</sup> Sejumlah lembaga menilai model pembiayaan utang, baik dalam bentuk pinjaman konvensional maupun pinjaman komersial, menimbulkan kekhawatiran tentang beban pendanaan JETP terhadap ruang fiskal Indonesia.

Porsi tambahan dari hibah seharusnya mampu menutupi pensiun dini PLTU batu bara sebagai bagian dari tanggung jawab negara maju terhadap sejarah utang mereka dalam masalah iklim. Selain itu, sesuai dengan *Paris Agreement*, negara maju harusnya memberikan hibah yang lebih besar berdasarkan prinsip "*common but differentiated*

---

46 Belakangan, Mizuho Bank of Finlandia dan Bank of China tercatat memiliki kebijakan untuk tidak membiayai PLTU. Lihat *Ibid*.

47 Sebagai salah satu contoh, lihat Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER), *et.al.*, "Penguatan Transisi Energi yang Inklusif, Hijau, dan Efektif: Suara dari CSOs di Indonesia," November 2023, diakses dari <https://coaction.id/katalog/penguatan-transisi-energi-yang-inklusif-hijau-dan-efektif-suara-dari-csos-di-indonesia/>.

*responsibilities.”*

Pinjaman non-konvensional—pinjaman dengan bunga berbasis pasar dan syarat lebih sulit dibandingkan dengan pinjaman konvensional, sebesar \$1 miliar, juga menimbulkan pertanyaan terkait komitmen IPG untuk pendanaan dengan pembiayaan yang lebih terjangkau di tengah kenaikan suku bunga global. Harusnya, negara-negara IPG mengurangi porsi pinjaman non-konvensional. Terutama, ketika tingkat pengembalian pinjaman berbasis pasar untuk mata uang lokal selama 10 tahun sebesar 6,83%. Sementara, hasil pasar surat utang Departemen Keuangan AS selama 10 tahun sebagai aset bebas risiko adalah 4,54%. Dengan kata lain, dengan pinjaman ini, pemerintah Indonesia harus membayar bunga tahunan setidaknya \$68,3 juta untuk mendanai transisi energi.

Apabila dibaca bersamaan dengan konteks tren pembiayaan terhadap industri batu bara di Indonesia yang masih secara masif dikucurkan oleh banyak lembaga keuangan, kehadiran JETP tidak banyak membantu persoalan tersebut. Justru, dapat dikatakan bahwa JETP malah turut andil membawa disorientasi terhadap politik pembiayaan energi Indonesia. Sengkarut persoalan yang dihadirkan oleh JETP cenderung membantu untuk mempertahankan eksistensi batu bara sebagai sumber energi yang dominan di Indonesia. Terlebih, per Desember 2023, CIPP JETP masih belum mengakomodir skema dekarbonisasi terhadap PLTU *off-grid* atau *captive*.<sup>48</sup>

## 03

### Utak-Atik Taksonomi Hijau & Potensi *Regulatory Capture*

Pemerintah Indonesia selaku regulator, pernah mencoba untuk memberikan sinyal kepada pasar untuk secara berangsur tidak lagi berinvestasi pada industri energi kotor. Sinyal tersebut diakomodir melalui dokumen panduan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bernama Taksonomi Hijau Indonesia.<sup>49</sup> Meski jauh dari sempurna, dokumen tersebut dapat dikatakan merupakan langkah baik untuk memantik pembiayaan berkelanjutan. Namun demikian, belakangan ini OJK justru melakukan revisi terhadap dokumen tersebut. Secara singkat terdapat klasifikasi baru yang memberikan ruang untuk adanya dukungan keuangan bagi industri ekstraktif. Praktis ini membawa Indonesia kembali ke masa lalu di mana industri ekstraktif masih didorong untuk mendapatkan

---

48 Luthfyana Kartika Larasati dan Tiza Mafira, Climate Policy Initiative, “Highlights from Indonesia’s JETP Comprehensive Investment and Policy Plan,” Desember 2023, diakses dari <https://www.climatepolicyinitiative.org/highlights-from-indonesias-jetp-comprehensive-investment-and-policy-plan/>.

49 Lihat Otoritas Jasa Keuangan, “Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1.0 - 2022,” diakses dari <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Taksonomi-Hijau-Indonesia-Edisi-1---2022.aspx>.

dukungan finansial secara memadai.

OJK menerbitkan panduan keuangan itu bernama "Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI)" pada Februari 2024. Taksonomi ini dapat digunakan perusahaan, salah satunya untuk mencari modal, dengan menunjukkan ruang lingkup usaha dalam taksonomi. Taksonomi ini juga berguna bagi investor untuk menempatkan uangnya agar tidak dianggap menghadirkan risiko ke lingkungan.

Ini merupakan kali kedua OJK menerbitkan taksonomi hijau setelah yang pertama diluncurkan pada 2022. Taksonomi ini berisi ruang lingkup investasi disebut "hijau" dan tidak. Pada taksonomi kedua ini, terdapat tiga kategori untuk menunjukkan ruang lingkup investasi, yaitu: *Hijau*, *Transisi*, dan *Tidak Memenuhi Kualifikasi*. Klasifikasi ini berbeda dengan taksonomi pertama di mana ada tiga ruang lingkup berbasis "lampu lalu lintas," yaitu: *Hijau*, *Kuning*, dan *Merah*.

Menurut OJK, kategori *Hijau* pada TKBI merujuk pada aktivitas yang telah sejalan dengan komitmen untuk menjaga kenaikan suhu global di bawah 1,5°C yang selaras dengan *Paris Agreement*. Termasuk telah mempertimbangkan *Net Zero Emission* (NZE) Indonesia tahun 2060 (atau lebih awal) dan memenuhi aspek sosial. Sementara, kategori *Transisi* adalah aktivitas yang saat ini belum sejalan dengan komitmen untuk menjaga kenaikan suhu global, belum berada pada jalur NZE, namun:

1. Bergerak menuju klasifikasi "Hijau" dalam jangka waktu tertentu;
2. Memfasilitasi pengurangan emisi yang signifikan dalam jangka pendek atau menengah dengan batas waktu tertentu; *atau*
3. Mendorong aktivitas lain untuk berkelanjutan dan memenuhi aspek sosial.

Bagi industri yang tidak memenuhi kedua klasifikasi di atas masuk dalam kategori *Tidak Memenuhi Kualifikasi*.

Tabel 2: Matriks Perbedaan Taksonomi Hijau Versi 1.0 dan 2.0

	Taksonomi Hijau 1.0	Taksonomi Hijau 2.0
<b>Nama</b>	Taksonomi Hijau Indonesia	Taksonomi Untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia
<b>Bulan &amp; Tahun Terbit</b>	Januari 2022	Februari 2024
<b>Sifat Dokumen</b>	<i>Living Document</i>	<i>Living Document</i>
<b>Kriteria</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Hijau</i>: tidak menimbulkan kerugian yang signifikan, menerapkan perlindungan minimum, memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan selaras dengan tujuan lingkungan Taksonomi;</li> <li>2. <i>Kuning</i>: tidak menimbulkan kerugian yang signifikan;</li> <li>3. <i>Merah</i>: kegiatan yang membahayakan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Hijau</i>: sejalan dengan komitmen untuk menjaga kenaikan suhu global di bawah 1,5°C yang sejalan dengan <i>Paris Agreement</i> termasuk mempertimbangkan <i>Net Zero Emission (NZE)</i> Indonesia tahun 2060 (atau lebih awal) dan memenuhi aspek sosial.</li> <li>2. <i>Kuning/Transisi</i>: aktivitas yang saat ini belum sejalan dengan komitmen untuk menjaga kenaikan suhu global, belum berada pada jalur NZE. Jika tidak memenuhi dua kategori tersebut, maka <i>Merah/Tidak Memenuhi Kualifikasi</i>.</li> </ol>
<b>Ruang Lingkup</b>	919 Subsektor terdiri atas 904 tidak masuk kategori <i>Hijau</i> dan 15 masuk kategori <i>Hijau</i> .	Sektor energi saja berupa 15 Subsektor, termasuk pembangkit listrik, pertambangan mineral kritis, gas. Sektor lain seperti yang belum masuk Taksonomi 2, masih mengacu Taksonomi 1.

<b>Poin Kontroversi</b>	Batu bara (Sektor Pertambangan) masuk kategori <i>Kuning</i> dan <i>Merah</i> .	Batu bara belum dikaji dalam Taksonomi 2. Sehingga, mengacu Taksonomi 1 yaitu <i>Kuning</i> dan <i>Merah</i> .  Namun, pada Taksonomi 2, PLTU yang akan pensiun dini masuk kategori <i>Hijau</i> . Kemudian, PLTU dalam RUPTL 2021-2023 dan PLTU <i>Captive</i> masuk kategori <i>Transisi</i>
-------------------------	---	--

Sumber: Taksonomi Hijau Indonesia 2022 ([tautan](#)) dan Taksonomi Untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia 2024 ([tautan](#))

Perubahan nama klasifikasi ini menunjukkan terdapat “politik bahasa” OJK yang membahayakan masa depan iklim. OJK menyebutkan, dalam masa transisi dari Taksonomi Hijau Indonesia (THI) ke Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI), kategori *Hijau* sama dengan *Hijau*, sedangkan, kategori *Kuning* diartikan menjadi *Transisi*. Terakhir, kategori *Merah* berarti *Tidak Memenuhi Kualifikasi*. Hal ini jelas menunjukkan adanya penghalusan makna klasifikasi THI yang dapat dikatakan sebagai bentuk *greenwashing* hingga bahkan berkontribusi terhadap diskursus *climate delay*. Jika klasifikasi *Kuning* dalam TKBI sama dengan *Kuning* dalam THI, seharusnya tidak perlu ada embel-embel “transisi.” Diksi ini justru menjadi bagian *greenwashing*, sesuatu yang bertolak belakang dari misi TKBI.

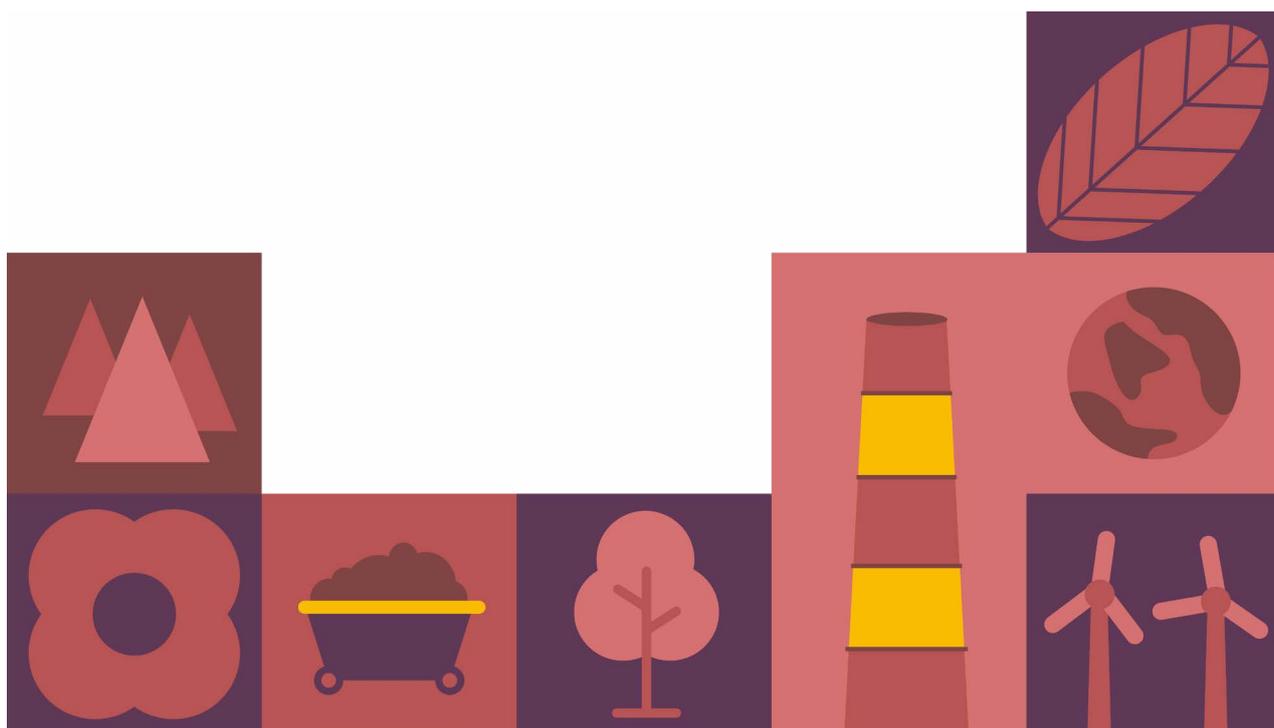
Dalam TKBI, terdapat perbedaan mencolok dengan THI. Salah satunya, investasi ke PLTU justru dilabeli *Hijau*. PLTU yang dapat dikategorikan Hijau ini mencakup PLTU yang akan mendapat pendanaan untuk penutupan atau pensiun dini. Padahal, dalam taksonomi pertama, investasi berbasis batu bara masuk kategori *Merah*. Pedoman baru ini muncul dengan alasan salah satunya mengikuti taksonomi di level ASEAN. Selain itu, taksonomi baru ini juga memberi label *Transisi* ke PLTU yang berada dalam RUPTL 2021—2030 yang telah dikunci melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. PLTU-PLTU tersebut listriknya mengalir ke jaringan milik PLN. Di luar itu, taksonomi kedua ini juga melabeli *Transisi* pada PLTU *captive* yang listriknya hanya untuk kawasan industri. Secara sektor, PLTU captive digunakan oleh industri nikel, *pulp and paper*, aluminium, kimia, semen dan lainnya. Hingga semester kedua 2023, total PLTU *captive* adalah 13,74 GW dan masih ada rencana pembangunan PLTU *captive* berbagai sektor total 20,47 GW. Semua label di atas menunjukkan TKBI tidak memiliki komitmen terhadap tujuan dari *Paris Agreement* yang memandatkan pengurangan pemakaian batu bara.

Merujuk RUPTL 2021-2030, masih ada 13,8 GW PLTU yang akan terus dibangun dan

beroperasi hingga tahun 2030. Melalui TKBI, dibuka kemungkinan adanya investasi, karena PLTU tersebut masuk dalam kategori *Transisi*. Pada TKBI, terdapat kontradiksi antara misi berkelanjutan dengan mempertahankan dominasi industri batu bara dalam energi Indonesia yang menunjukkan ketidakseriusan pemerintah mengurangi pemakaian batu bara.

Pelabelan PLTU menjadi *Hijau* dan *Transisi* ini menunjukkan kontradiksi. Batu bara dalam THI masuk kategori *Kuning* dan *Merah*. Sementara itu, TKBI sebenarnya belum memiliki kategori untuk batu bara. Sehingga, pengkategorianya mengacu pada taksonomi sebelumnya (THI). Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi dalam menyusun taksonomi di TKBI, di mana, PLTU diklasifikasikan sebagai *Hijau* dan *Transisi*, sementara batu bara malah tidak masuk kategori *Hijau*. Tujuan dari TKBI seharusnya untuk mengurangi *greenwashing* terhadap aktivitas ekonomi yang masuk kategori. Justru sebaliknya, TKBI malah menebalkan praktik *greenwashing* itu sendiri. Investor mendapat panduan investasi yang akan mengotori portofolio mereka karena mendukung proyek batu bara di pembangkit listrik.

Tidak lama setelah penerbitan TKBI, investor tampak menyambut panduan investasi ini untuk pemensiunan dini PLTU Cirebon-1 dengan kapasitas 660 MW yang sudah masuk dalam rencana. Tiga bank internasional: HSBC, Standard Chartered, dan Bank of America dilaporkan tertarik untuk ikut mendanai pensiun dini PLTU Cirebon-1.



Dalam pendanaan pensiun dini PLTU Cirebon-1, sumber dana berasal dari program JETP yang di dalamnya ada negara-negara G7 yang tergabung dalam IPG dan institusi keuangan dalam GFANZ. Tiga bank yang akan ikut mendanai PLTU Cirebon-1 adalah bagian dari GFANZ. Langkah GFANZ ini muncul setelah terbit TKBI. Sebelumnya, GFANZ dalam rencana investasi JETP belum mendetailkan dukungan. Meskipun demikian, secara prinsip JETP ini harus berjalan secara berkeadilan seperti elemen pertama yaitu “*just.*” Seharusnya, “adil” juga dimaknai dengan tidak menempatkan pemakaian batu bara di PLTU dalam kategori *Hijau*.

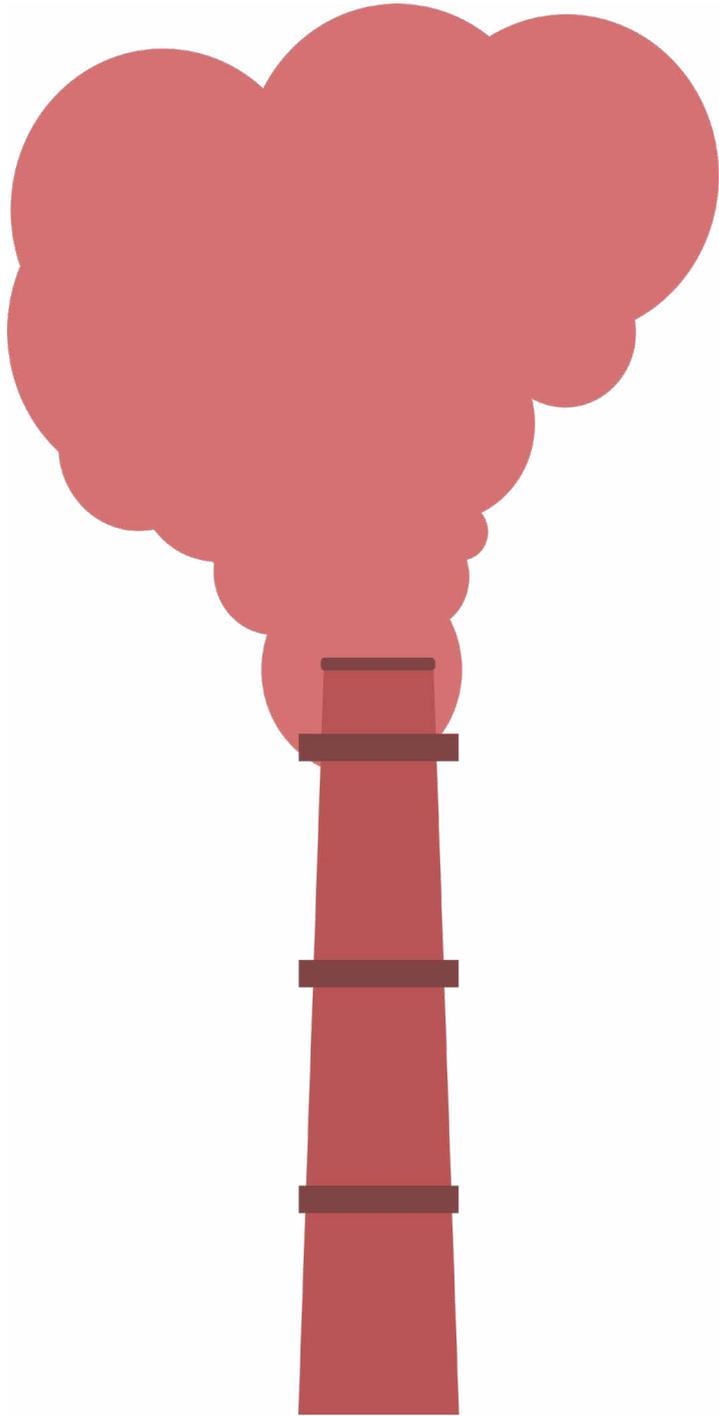
Apabila mengacu pada sejumlah literatur mengenai korupsi sistemik, fenomena ketika aktor–umumnya pemerintah atau legislator, yang diberikan tanggung jawab untuk mengatur suatu sektor demi kepentingan publik, justru malah mengakomodir kepentingan segelintir atau bahkan kepentingan dari sektor yang seharusnya diregulasi, biasa dikenal dengan *regulatory capture*.<sup>50</sup> Dalam konteks tata kelola energi, *regulatory capture* pada skala makro sudah jamak terjadi di Indonesia dan telah banyak dipetakan polanya oleh sejumlah pihak.<sup>51</sup>

Ilustrasi pada sub-bab ini merupakan contoh lainnya dari fenomena *regulatory capture* di Indonesia pada sektor energi. Pemerintah, dalam hal ini melalui OJK, justru tidak berperan aktif demi menjamin kepentingan publik. Sebaliknya, ketimbang menyusun pedoman pembiayaan hijau bagi investor yang mendorong transisi energi bersih berkeadilan, OJK justru terlihat condong untuk mengedepankan kepentingan finansial dari industri batu bara semata melalui TKBI alias Taksonomi Hijau 2.0.

---

50 Lihat misalnya Ernesto Dal Bó, “Regulatory Capture: A Review,” *Oxford Review of Economic Policy*, Vol.22, No. 2, 2006, hlm. 203.

51 Lihat misalnya Iman Prihandono dan Ekawestri Prajwalita Widiati, “Regulatory capture in energy sector: evidence from Indonesia,” *The Theory and Practice of Legislation*, Vol. 11, No. 3, 2023.





# Perusahaan-Perusahaan Batu Bara Terbesar di Indonesia dan Sumber Pembiayaannya

Laporan ini menyusuri laporan keuangan tujuh grup perusahaan batu bara besar di Indonesia dengan kriteria yang mencakup luas konsesi, produksi, kepemilikan PLTU, pemilik *high-profile* secara politik. Tujuh perusahaan tersebut antara lain: PT Adaro Energy Indonesia, PT Bumi Resources, PT Dian Swastatika Sentosa, PT Bayan Resources, PT Indika Energy, PT TBS Energi Utama (dulu Toba Bara Sejahtera), dan PT Multi Tambangjaya Utama.

Tabel 3: Tujuh Perusahaan Batu Bara Besar di Indonesia

Nama Perusahaan	Luas Konsesi (Ha)	Produksi 2023 (Dalam Juta Ton)	Kepemilikan PLTU	Total Kapasitas PLTU (MW)
Adaro	307.949	62–64	PLTU Batang, PLTU Smelter Kaltara	3.100
Bumi Resources	257.237	75–80	PLTU Tanjung Bara*	54
Dian Swastatika Sentosa (Sinar Mas)	164.937	40	PLTU Sumsel 5, Kalteng 1, Kendari 5	900
Bayan Resources	91.901	42–48	PLTU Kariangau**	30
Indika Energy	91.437	31	PLTU Cirebon 1-2	1.660
TBS Energi Utama	7.087	3–3,5	PLTU Sulut 3, PLTU Sulbagut 1	200
Barito Pacific***	24.970	1,8	PLTU Jawa 9-10	2.000

Sumber: Diolah dari *annual report* masing-masing perusahaan dan berbagai pemberitaan di media.

\*PLTU untuk kawasan industri dan masyarakat.

\*\*PLTU untuk kawasan industri.

\*\*\*Barito Pacific mengakuisisi tambang batu bara PT Multi Tambangjaya Utama dari PT Indika Energy pada September 2023.

# 01 Penguasa Hulu-Hilir Bisnis Kotor



## ADARO

Konglomerasi grup Adaro memiliki afiliasi dengan dengan Garibaldi Thohir dan keluarga Thohir. Garibaldi Thohir merupakan salah satu orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan \$3,3 miliar (setara sekitar Rp53,5 triliun). Grup Adaro merupakan salah satu perusahaan batu bara dengan konsesi dan produksi terbesar di Indonesia. Di bawah payung Adaro, terdapat luas konsesi batu bara dengan total 307.949 hektare.

Pada 2023, PT Adaro Energy Indonesia, mengeksploitasi 65,88 juta ton batu bara. Batu bara ini sebagian besar diekspor ke luar negeri dan sebagian ke dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang diwajibkan pemerintah.

Grup Adaro juga mengutilisasi batu bara miliknya untuk menyuplai kebutuhan pembangkit listrik di dalam negeri. Adaro bahkan memaksimalkan bisnis batu bara di hilir dengan membangun PLTU batu bara bersama mitranya di bawah PT Bhimasena Power Indonesia di Batang, Jawa Tengah (kapasitas 1.000x2 MW). Penguasaan bisnis batu bara hulu dan hilir ini membuat Adaro tak terhindarkan lagi merupakan bagian dari oligarki. Dengan basis bisnis ekstraktif kotor yang kuat itu, Adaro terkoneksi dengan sejumlah pejabat tinggi Indonesia. Pemegang saham Adaro, Garibaldi Thohir adalah kakak dari Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara. Dia juga memiliki koneksi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Indonesia terpilih 2024, Prabowo Subianto. Bersama orang-orang terkaya yang menguasai sepertiga kekayaan Indonesia, Garibaldi terang-terangan memihak pada Prabowo saat Pemilu 2024.

PT Adaro Energy Indonesia, salah satu produsen batu bara terbesar di Indonesia, menurut Global Witness pada 2019, Adaro diduga melakukan kejahatan keuangan berupa penghindaran pajak. Modusnya berupa memindahkan keuntungan dari aktivitas jual-beli

batu bara dengan perusahaan terafiliasi berbasis di negara suaka pajak. Apabila dugaan ini benar, terdapat estimasi kerugian bagi Indonesia dalam bentuk hilangnya potensi pembayaran pajak sebesar \$125 juta selama 2009—2017 (jika aktivitas bisnis tersebut justru dilakukan di Indonesia). Adaro tidak mengomentari tuduhan tersebut kepada Global Witness, tetapi, memberikan sanggahan kepada media. Batu bara yang jelas memperparah krisis iklim akan terus berkembang di bawah Adaro. Terbaru, Adaro tengah membangun PLTU baru di Kalimantan Utara dengan kapasitas 1.100 MW untuk kawasan industri pengolahan dan pemurnian bauksit atau aluminium. PLTU ini akan berkontribusi pencemaran udara yang berupa karbondioksida (CO<sub>2</sub>) sebesar 5,2 juta ton per tahun.



## SINAR MAS

Salah satu perusahaan hulu dan hilir batu bara berikutnya adalah Sinar Mas. Perusahaan ini merupakan sebuah konglomerasi bisnis. Tidak hanya batu bara, portofolio Sinar Mas mencakup sawit, *pulp and paper*, hingga pembangkit listrik. Setidaknya, terdapat dua perusahaan di bawah Sinar Mas dalam bisnis hulu-hilir batu bara yaitu PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) dan PT Global Energy Mines Tbk (GEMS). Pemegang saham DSSA adalah keluarga Sinar Mas yaitu Franky Oesman Widjaja, Indra Widjaja, dan Mukhtar Widjaja. Sinar Mas didirikan oleh Eka Tjipta Widjaja, meninggal pada usia 98 tahun pada 2019. Saat masih hidup, Eka Tjipta menempati jajaran orang terkaya Indonesia dengan kekayaan mencapai \$9,7 miliar (setara Rp 140 triliun).

DSSA mengoperasikan dan memiliki PLTU berupa empat PLTU *captive* (*off-grid*/listrik hanya untuk kawasan industri) untuk perusahaan *pulp and paper* milik grup Sinar Mas di Serang, Tangerang, dan Karawang, Provinsi Banten dengan total kapasitas 300 MW. Selain itu, anak perusahaan DSSA yaitu PT Datang DSSP Power Indonesia memiliki tiga unit PLTU (*on-grid*/listrik tersambung jaringan PLN) dengan total kapasitas 600 MW di Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Tengah. Di bawah payung DSSA, terdapat anak perusahaan untuk eksploitasi batu bara yaitu PT Global Energy Mines Tbk (GEMS), merupakah salah satu perusahaan dengan produksi terbesar di Indonesia. Pada 2023, GEMS memproduksi 30 juta ton batu bara, kemudian akan meningkat menjadi 40 juta ton pada 2024.

Jejak keterlibatan Sinar Mas dalam politik dapat ditelusuri dari Gandi Sulistyanto yang bekerja selama 30 tahun di perusahaan ini dengan posisi terakhir sebagai direktur utama Sinar Mas. Semenjak 2021, Gandi meninggalkan Sinar Mas dan kemudian dipilih oleh Presiden Jokowi menjadi Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan. Karier politiknya berlanjut sebagai pada 2023 dan kembali dipilih oleh Jokowi sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Gandi bukan orang baru di lingkaran Jokowi. Itu terlacak dalam

sebuah laporan tentang gurita bisnis keluarga Jokowi. Gandi bersama keluarganya terindikasi berbisnis *start-up* kuliner dengan dua putra Jokowi, Kaesang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka di bawah kongsi PT Harapan Bangsa Kita atau dikenal dengan GK Hebat. Jejaring bisnis hulu dan hilir energi kotor grup Sinar Mas ini menempatkan perusahaan ini bagian dari oligarki yang menautkan praktik bisnis dan politik dalam satu tarikan napas.



### **TBS ENERGY UTAMA**

PT TBS Energi Utama Tbk (Toba), sebelumnya bernama PT Toba Bara Sejahtera, menjadikan batu bara sebagai salah satu pilar bisnis mereka. Perusahaan ini terafiliasi dengan Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia. Luhut saat ini masih memiliki saham di PT TBS Energi Utama, meskipun minoritas dan tidak secara langsung (melalui PT Toba Sejahtera). Dulu, Luhut merupakan pemegang saham mayoritas PT TBS Energi Utama (sebelumnya bernama PT Toba Bara Sejahtera) dan berperan mendirikan perusahaan ini. Selain itu, PT TBS Energi Utama dikontrol oleh keponakannya, *Pandu Sjahrir*. Hal ini menunjukkan masih adanya peran Luhut dalam Toba. Sekalipun dalam sejumlah kesempatan, PT TBS Utama

membantah keterlibatan Luhut dalam pengambilan keputusan perusahaan dengan dalih kepemilikan *saham minoritas*.

Perusahaan ini berkembang dari tambang batu bara ke pembangkit listrik batu bara. Selain itu, perusahaan memiliki fokus ke perkebunan sawit, pembangkit listrik air mikro, dan juga kendaraan listrik yang bermitra dengan GoJek, perusahaan *start-up* besar.

Sejak 2014, Luhut menjadi menteri di kabinet Presiden Joko Widodo. Luhut mampu bertahan lama di pemerintahan karena dapat dikatakan merupakan orang kepercayaan Jokowi. Luhut bahkan pernah tercatat setidaknya memiliki 21 jabatan publik yang berbeda. Dari jabatan-jabatan tersebut, termasuk pula tugas-tugas yang berada di luar fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Sepanjang Luhut menjabat sebagai menteri, bisnis Toba turut berkembang. Terdapat dua PLTU yang dibangun dan beroperasi dalam rentang Luhut menjadi menteri. Toba membangun PLTU Sulut-3 dengan kapasitas 2x50 MW di Sulawesi Utara, dan PLTU Sulbagut-1 kapasitas 2x50 MW di Gorontalo. Keduanya dibangun pada 2016–2017 dan beroperasi di tahun 2021.

PLTU tersebut berkontribusi ke perusahaan selama puluhan tahun sesuai dengan kontrak jual-beli listrik atau *Power Purchase Agreement (PPA)*. Jangka waktu kontrak ini biasanya

selama 25 tahun sejak PLTU beroperasi. Keuntungan bagi perusahaan penyedia akan didapatkan melalui penjualan terhadap seluruh daya listrik yang dihasilkan kepada PLN selaku pembeli. Dua PLTU di atas mendapatkan pendanaan dari bank nasional. PLTU Sulut-3 mendapatkan pinjaman sebesar \$168 juta dari Bank Mandiri dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Kemudian, PLTU Sulbagut-1 mendapat pinjaman \$230 juta dari Bank Mandiri.

Bisnis yang beririsan dengan jabatan politik merupakan salah satu taktik oligarki yang telah beroperasi di Toba.



Arsjad Rasjid merupakan Direktur Utama PT Indika Energy Tbk. Arsjad terafiliasi dengan urusan politik. Selain menjabat sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, dia terlibat sebagai Ketua Tim Pemenangan pencalonan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada Pemilu 2024. Lagi-lagi taktik oligarki yang menautkan politik dengan bisnis ekstraktif juga berlangsung di Indika.

## **INDIKA ENERGY**

Tentakel bisnis Indika berkaitan dengan ekstraksi batu bara. Salah satu anak perusahaan Indika adalah PT Kideco Jaya Agung. Kideco memiliki konsesi batu bara seluas 33.887 hektare di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Kideco merupakan perusahaan tambang tua. Telah beroperasi sejak 1982, Kideco masih akan beroperasi hingga 2033. Indika juga pernah memiliki tambang batu bara PT Multi Tambangjaya Utama (MTU) di Kalimantan Tengah dengan luas konsesi 24.970 hektare. Per akhir Februari 2024, PT MTU telah selesai dijual ke grup Barito Pacific.

Secara umum, tambang batu bara di Indonesia berkontribusi besar terhadap pendidihan global melalui salah satunya emisi gas metana (CH<sub>4</sub>) yang dihasilkan secara masif. Bahkan berdasarkan salah satu hasil riset lembaga independen, jumlah emisi CH<sub>4</sub> yang dilepaskan di Indonesia pada kenyataannya berpotensi lebih besar 7 (tujuh) kali lipat dari yang secara resmi dilaporkan oleh pemerintah. Tambang batu bara PT Indika Energy yang beroperasi hingga 51 tahun di atas tentu saja menjadi kontributor pemicu pendidihan global.

Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh Kideco seperti melalui emisi CH<sub>4</sub> akan bertambah pada saat batu bara dibakar melalui pembangkit listrik. Indika terlibat dalam pembangunan sekaligus memiliki saham dari dua pembangkit, yaitu PLTU Cirebon-1 dengan kapasitas 1x660 MW. Indika memegang saham sejumlah 20% melalui PT Cirebon Electric Power. Untuk PLTU Cirebon-2 dengan kapasitas 1x1.000 MW, Indika memiliki saham sebesar 6,3% lewat PT Cirebon Energi Prasarana. Salah satu gas pemicu pendidihan global dari PLTU adalah karbondioksida (CO<sub>2</sub>). Pada 2018, emisi CO<sub>2</sub> di PLTU Cirebon-1

menyentuh angka 4,4 juta ton.

Pemerintah tengah merencanakan untuk menutup PLTU Cirebon-1 tujuh tahun lebih awal, yakni pada 2035. Ini lebih cepat dari kontrak awal yang memberikan PLTU Cirebon-1 umur operasi 30 tahun sampai 2042. Meskipun demikian, langkah penutupan ini dikritik karena didanai melalui skema utang. Di sisi lain, Indika tetap mengoperasikan PLTU Cirebon-2 yang telah berjalan sejak 2023. Artinya, Indika mendapatkan dua keuntungan sekaligus: dari penutupan lebih awal PLTU Cirebon-1 yang diganti dengan uang dan pemasukan dari tetap beroperasinya PLTU Cirebon-2. Hal ini menunjukkan program pensiun dini PLTU belum mencerminkan aspek keadilan terhadap iklim. Meskipun program dini PLTU Cirebon-1 masuk dalam kerangka JETP, sejumlah kelompok masyarakat sipil menilai program tersebut masih belum dapat dikatakan adil.



## BARITO PACIFIC

Prajogo Pangestu, konglomerat bisnis energi dan petrokimia, memiliki kekayaan US\$ 61,8 miliar (setara hampir Rp 1.000 triliun). Ini menjadikannya sebagai orang terkaya di Indonesia per 14 Mei 2024. Prajogo merupakan *ultimate beneficial owner* dari grup PT Barito Pacific Tbk yang memiliki lini bisnis dari tambang batu bara, pembangkit listrik batu bara dan panas bumi (*geothermal*), hingga pabrik pengolahan bahan kimia.

PT Barito Pacific berkongsi dengan PT PLN melalui anak usahanya membentuk perusahaan khusus bernama PT Indo Tenaga Raya (ITR) untuk membangun salah satu pembangkit listrik terbesar di Indonesia, yaitu PLTU Jawa 9 dan 10 (kapasitas 2x1.000 MW) di Banten. Untuk tambang batu bara, pada akhir tahun 2023, Barito mengakuisisi perusahaan tambang batu bara PT Multi Tambangjaya Utama dari PT Indika Energy dengan nilai US\$ 218 juta (sekitar Rp 3,5 triliun). Dengan pembelian ini, Barito melengkapi portofolio kotornya dari hulu hingga hilir batu bara.

Pendanaan PLTU Jawa 9 dan 10 melibatkan Bank Dunia (World Bank) melalui lengan bisnisnya yakni *International Finance Corporation* (IFC) yang memberikan pinjaman kepada Hana Bank, bank asal Korea Selatan. Hana Bank memberikan pinjaman kepada PT ITR untuk membangun PLTU Jawa 9 dan 10. Atas keterlibatan *World Bank* dalam pendanaan PLTU ini, sejumlah kelompok masyarakat sipil mengadukan *World Bank* ke *Compliance Advisor Ombudsman* (CAO), lembaga penyedia mekanisme pengaduan atas dampak proyek yang didukung oleh *World Bank*.<sup>52</sup> PLTU Jawa 9 dan 10 ini akan menghasilkan 250 juta ton karbondioksida (CO<sub>2</sub>) yang tentu memperparah krisis iklim.

52 Pengaduan atas PLTU yang didanai *World Bank* atas kontribusinya terhadap krisis iklim dan dampak buruk kesehatan yang ditimbulkannya ke CAO merupakan hal yang relatif jarang dilakukan di Indonesia.

PLTU ini juga berpotensi menyebabkan ribuan kematian di masa depan. Pendanaan PLTU ini oleh World Bank telah melanggar kebijakan Pendekatan Ekuitas Hijau (*Green Equity Approach*).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kekayaan Prajogo ditopang juga oleh batu bara dan PLTU yang jelas berdampak buruk bagi lingkungan dan manusia. Kekayaan seperti ini disusun atas kerusakan lingkungan melalui ekstraksi terhadap sumber daya alam.

## 02 Pemberi Dana Perusahaan Batu Bara di Indonesia

### 1. Adaro Energy Indonesia (Pinjaman Bank Nasional untuk Proyek Smelter Aluminium)

No.	Nama Bank	Pinjaman dalam US Dollar	Jumlah Pinjaman jika Dikonversi ke Rupiah dengan Asumsi Kurs \$1 = Rp16.230
1.	Mandiri	\$585.000.000	Rp9.494.550.000.000
2.	BNI	\$350.000.000	Rp5.680.500.000.000
3.	BRI	\$450.000.000	Rp7.303.500.000.000
4.	BCA	\$270.000.000	Rp4.382.100.000.000
5.	Permata	\$100.000.000	Rp1.623.000.000.000
<b>TOTAL</b>		<b>\$1.755.000.000</b>	<b>Rp24.539.760.000.000</b>

Sumber: [Market Forces](#)

PT Adaro Energy Indonesia Tbk (Adaro) sebagai salah satu perusahaan batu bara besar di Indonesia, sedang membangun *smelter* aluminium yang akan menggunakan PLTU batu bara di Kalimantan Utara. Pada 12 Mei 2023, Adaro mendapat pendanaan dari lima bank

nasional di Indonesia, yakni: Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, dan Bank Permata.<sup>53</sup> Mereka memberikan Rp2,5 triliun dan \$1,5 triliun utang untuk smelter dan PLTU, Kalimantan Aluminium Industri (KAI) dan Kaltara Power Indonesia (KPI) dengan tenor 8 dan 10 tahun.<sup>54</sup> Dengan kata lain, pinjaman ini akan berakhir pada 2031 dan 2033.

Umumnya, Adaro mendapatkan pendanaan dari sindikasi bank yang rinciannya tidak disebutkan dalam laporan keuangan. Namun, bank nasional seperti Mandiri tercatat menjadi agen fasilitas untuk sindikasi ini.

Laporan tahunan Adaro 2020 mencatat, pada 2014, sindikasi bank internasional yang difasilitasi Overseas Chinese Banking Corporation Limited menjadi agen fasilitas sindikasi untuk pinjaman sebesar \$1.000.000 (sekitar Rp16.230.000.000). Laporan tahunan tersebut juga mencatat bahwa pada 2015, Adaro juga mendapat pinjaman \$200.000 (sekitar Rp3.246.000.000) untuk sindikasi yang difasilitasi DBS Bank. Pada 2018, Bank Mandiri menjadi agen fasilitas kredit senilai \$350.000 (sekitar Rp5.680.500.000) dari sindikasi sejumlah bank.

## 2. Bumi Resources

No.	Pemberi Pinjaman	Dalam US Dollar	Jumlah Pinjaman jika Dikonversi ke Rupiah dengan Asumsi Kurs \$1 = Rp16.230
1.	Wexler Capital Pte. Ltd (Wexler)	\$100.961.331	Rp1.638.753.844.126
2.	PT AP Investment	\$30.000.000	Rp486.945.000.000
3.	Bank Negara Indonesia	\$68.800.000	Rp1.116.727.200.000
<b>TOTAL</b>		<b>\$199.761.331</b>	<b>Rp3.242.426.044.126</b>

Sumber: Laporan tahunan Bumi Resources 2020, 2021, 2022

53 Market Forces, "Banks can't fund Adaro's smelter without funding coal," diakses dari <https://www.marketforces.org.au/campaigns/asia/adaro-smelter/>.

54 *Ibid.*

Berdasarkan *Supplemental Agreement* pada tanggal 28 Oktober 2016, Credit Suisse AG, BRMS, dan Wexler Capital sepakat untuk mengalihkan jumlah pinjaman Bumi Resources sebesar \$100.961.331 (sekitar Rp1.638.602.402.130) kepada Wexler. Pengalihan pinjaman mulai berlaku efektif tanggal 2 Desember 2016 dengan jangka waktu pinjaman selama 2 tahun dan tingkat bunga pinjaman sebesar 10% per tahun. Pada 2017, terjadi sengketa dan Wexler mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berujung pada perdamaian dengan jumlah pinjaman menjadi Rp2,5 triliun.

Selain itu, pada 2021, sebuah lembaga keuangan domestik milik taipan Agus Projosasmito, PT AP Investment, juga memberikan pendanaan untuk Bumi Resources senilai \$30 juta (sekitar Rp486,9 miliar). Pada Desember 2021, PT AP Investment mengalihkan kredit kepada PT Adiprotek Envirodunia (ADPRO).

Sejak belakangan terdapat tren sejumlah bank dari luar negeri mundur dari pembiayaan batu bara, bank BUMN justru mengambil peran tersebut.

Bank BNI, sebagai salah satu BUMN, mulai memberikan fasilitas kredit untuk grup Bumi Resources milik keluarga Aburizal Bakrie ini sejak 2021 dengan nilai \$17.341.000 (sekitar Rp281,4 miliar) dan pada 2022 dengan nilai \$51.459.000 (sekitar Rp835 miliar). Total pinjaman yang diberikan BNI pada kurun waktu ini mencapai \$68,8 juta atau sekitar Rp1,1 triliun.

Selain memberikan fasilitas pinjaman berjangka, kredit investasi, pinjaman transaksi khusus, dan kredit modal kerja, terdapat pula fasilitas pembiayaan seperti garansi bank dan pembiayaan premi asuransi tahunan. Pinjaman berjangka umumnya digunakan untuk membeli alat berat dan pembelian alat telekomunikasi.

Pinjaman sindikasi berupa kredit investasi yang diberikan Mandiri dan BCA untuk Bumi Resources pada Desember 2016 senilai Rp343 miliar dengan jangka waktu sepuluh tahun untuk membiayai penambangan dan pembangunan fasilitas tambang batu bara. Aset-aset termasuk kapal tongkang menjadi jaminan untuk pinjaman-pinjaman ini.

Dukungan dari lembaga keuangan luar negeri juga mengalir ke grup Bumi Resources. Pada tahun 2016, grup ini mendapat pendanaan dari lembaga keuangan luar negeri, Credit Suisse Group AG (asal Swiss) dan Wexler Capital (asal Singapura) senilai Rp1,6 triliun.

### 3. Dian Swastatika Sentosa (DSSA)

No.	Pemberi Pinjaman	Dalam USD/AUD	Jumlah Pinjaman jika Dikonversi ke Rupiah dengan Asumsi Kurs \$1 = Rp16.230 & AU\$1 = Rp10.780
1.	Bank Mega	\$160.000.000	Rp1.596.800.000.000
2.	Bank Danamon	\$5,000,000	Rp81.150.000.000
3.	Bank Mandiri	\$1.161.000.000	Rp18.843.030.000.000
4.	PT Sarana Multi Infrastruktur	\$224.900.000	Rp3.650.127.000.000
5.	ICICI Bank Limited, Cabang Bahrain	\$47.000.000	Rp762.810.000.000
6.	Elantis Premium Funding Limited (Elantis)	\$1.126.786	Rp18.287.736.780
7.	Sindikasi Mandiri dan BCA	(pinjaman dalam bentuk rupiah)	Rp343.434.000.000
8.	Sindikasi SMI, Mandiri, BCA, Bank Permata, dan Bank Shinhan Indonesia	(pinjaman dalam bentuk rupiah)	Rp5.982.900.000.000
9.	Bank Negara Indonesia	(pinjaman dalam bentuk rupiah)	Rp212.190.000.000
10.	Mandiri, Bank Shinhan Indonesia, SMI dan BCA	\$315.700.000	Rp5.123.811.000.000
11.	China Development Bank Corporation (CDBC)	\$468.000.000	Rp7.595.640.000.000

12.	Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC)	\$160.000.000	Rp2.596.800.000.000
13.	Credit Suisse AG, Cabang Singapura (SUISSE)	AU\$150.000.000	Rp1.616.850.000.000
14.	Bank Permata	\$16.943.336	Rp274.990.343.280
15.	Cisco Systems Capital Asia Pte. Ltd. (CISCO)	<i>(pinjaman dalam bentuk rupiah)</i>	Rp773.000.000.000
16.	Elantis Premium Funding Limited (Elantis)	\$1.151.093	Rp18.682.239.390
17.	Cisco Systems Capital Asia Pte. Ltd. (CISCO)	\$6.604.191	Rp107.186.019.930
18.	Clearmatch Originate Pty. Ltd	\$3.981.509	Rp64.619.891.070
19.	Deutsche Bank AG, Cabang Sydney	AU\$50.000.000	Rp539.000.000.000
20.	Bank Woori Saudara Indonesia 1906 (BWS)	\$12.000.000	Rp194.760.000.000
21.	Bank Mandiri dan BWS	\$150.000.000	Rp2.434.500.000.000
22.	Bank Syariah Indonesia (BSI)	<i>(pinjaman dalam bentuk rupiah)</i>	Rp400.000.000.000
23.	Global Loan Agency Services Australia Pty. Ltd.	\$625.000.000	Rp10.143.750.000.000
24.	Ascend Capital Advisor(s) Pte. Ltd.	\$120.000	Rp1.947.600.000

25.	Caterpillar Financial Australia Limited (CATERPILLAR)	\$5.074.144	Rp82.353.357.120
<b>TOTAL</b>			<b>Rp63.458.619.187.570</b>

Sumber: Laporan Tahunan 2020, 2021, 2022

#### 4. Bayan Resources

No.	Pemberi Pinjaman	Dalam US Dollar	Jumlah Pinjaman jika Dikonversi ke Rupiah dengan Asumsi Kurs \$1 = Rp16.230
1.	Bank Permata	\$340.000.000	Rp5.497.800.000.000
2.	Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)	\$280.000.000	Rp4.527.600.000.000
3.	Bank Mandiri	\$75.000.000	Rp1.212.750.000.000
4.	Bank QNB Indonesia	\$50.000.000	Rp808.500.000.000
<b>TOTAL</b>		<b>\$745.000.000</b>	<b>Rp11.001.350.000.000</b>

Sumber: Laporan Tahunan 2020, 2021, 2022

## 5. Indika Energy (termasuk Multi Tambang Jaya Utama)

Pada saat laporan ini ditulis, PT Multi Tambang Jaya Utama masih menjadi salah satu anak perusahaan Indika Energy. Pada Februari 2024, anak perusahaan ini telah selesai diakuisisi oleh PT Petrindo Jaya Kreasi. Perusahaan yang dimiliki oleh salah satu pengusaha terkaya di Indonesia, Prajogo Pangestu.

No.	Pemberi Pinjaman	Dalam US Dollar	Jumlah Pinjaman jika Dikonversi ke Rupiah dengan Asumsi Kurs \$1 = Rp16.230
1.	Bank Mandiri	\$1.587.194.144	Rp25.760.160.957.120
2.	Bank HSBC Indonesia	\$70.000.000	Rp1.136.100.000.000
3.	Citibank	\$80.000.000	Rp1.298.400.000.000
4.	PT Saipem Indonesia (Saipem)	\$9.771.429	Rp158.590.292.670
5.	PT Chiyoda International Indonesia (Chiyoda)	\$8.228.571	Rp133.549.707.330
6.	Bank Permata	\$15.000.000	Rp243.450.000.000
7.	Bank Woori Saudara Indonesia 1906	\$15.000.000	Rp243.450.000.000
8.	PT Sarana Multi Infrastruktur	(pinjaman dalam bentuk rupiah)	Rp256.634.000
9.	Standard Chartered Bank	\$12.797.716	Rp207.706.930.680
10.	DBS Bank	\$3.300.000	Rp53.559.000.000
<b>TOTAL</b>			<b>Rp29.235.223.521.800</b>

Sumber: Laporan tahunan 2020, 2021, 2022

## 6. TBS Energi Utama

No.	Pemberi Pinjaman	Dalam US Dollar	Jumlah Pinjaman jika Dikonversi ke Rupiah dengan Asumsi Kurs \$1 = Rp16.230
1.	Sindikasi Bank Mandiri dan PT Bank KEB Hana Indonesia	\$120.000.000	Rp1.940.400.000.000
2.	Sindikasi Bank Mandiri dan PT Sarana Multi Infrastruktur	\$157.986.000	Rp2.554.633.620.000
3.	Bank Mandiri	\$718.500.513	Rp11.618.153.295.210
4.	Bank Rakyat Indonesia	(pinjaman dalam bentuk rupiah)	Rp16.113.186.915.210
5.	Citibank N.A., Indonesia	\$14.000.000	Rp226.380.000.000
<b>TOTAL</b>			<b>Rp32.452.753.830.420</b>

Sumber: Laporan Tahunan 2020, 2021, 2022

Dalam penelusuran laporan tahunan dari 6 (enam) di atas, kami menemukan pemberian pinjaman sindikasi dari beberapa lembaga keuangan untuk masing-masing perusahaan.<sup>55</sup> Karena pada tiap laporan keuangan tidak terdapat rincian porsi pinjaman yang diberikan oleh masing-masing lembaga keuangan, data tersebut disajikan secara gabungan dan pada bagian yang terpisah seperti di atas.

Beberapa tahun terakhir, eksploitasi batu bara di Indonesia mengalami tren peningkatan. Terutama setelah pandemi COVID-19 terjadi. Pada 2020—2023, setiap tahunnya, produksi batu bara tercatat naik. Pada 2024, target produksi berada pada angka 710 juta ton, lebih rendah dari realisasi produksi 2023 sebesar 775 juta ton. Meski demikian, target ini paling tinggi dari target produksi tahun 2023 sebesar 694,5 juta ton. Produksi batu bara yang terus melejit secara linier mengingkari upaya transisi energi Indonesia.

<sup>55</sup> Pinjaman sindikasi merupakan pinjaman yang diberikan beberapa bank dan/atau lembaga keuangan secara bersama-sama (lebih dari satu bank dan/atau lembaga pembiayaan).

Wajah lain dari pengingkaran transisi energi ini juga tampak dari pola pembiayaan industri batu bara di Indonesia. Bank-bank nasional saat ini menjadi “benteng terakhir” bagi industri ekstraktif untuk mendapatkan pendanaan. Sebab, dewasa ini terdapat sebuah tren: bank-bank multinasional mulai secara serius meninggalkan pembiayaan batu bara.

Merujuk sebuah laporan yang dikeluarkan oleh koalisi organisasi non-pemerintah internasional, per 2022, terdapat 47 bank di dunia memiliki kebijakan mengecualikan batu bara dari portofolio pembiayaan.<sup>56</sup> Kemudian, terdapat 16 bank-bank lain mengecualikan pembiayaan ke semua perusahaan yang memiliki pertambangan batu bara, PLTU, maupun yang tengah merencanakan ekspansi infrastruktur batu bara. Artinya, bank-bank ini menjalankan kebijakan internal untuk membatasi dan memperketat keterlibatan pendanaan ke proyek terkait batu bara. Kebijakan-kebijakan ini umumnya bertujuan untuk menyelaraskan diri dengan tujuan-tujuan lingkungan hidup dan sosial dengan mengurangi dukungan keuangan ke pertambangan batu bara, PLTU, atau usaha-usaha lain yang berhubungan dengan batu bara. Semuanya didasari oleh kekhawatiran mengenai berbagai dampak lingkungan dari penggunaan batu bara, salah satunya krisis iklim.

Secara formal, bank-bank nasional sebetulnya bukan tidak memiliki komitmen untuk mengurangi eksposur pembiayaan batu bara. Sebagai contoh, Bank Mandiri, bank BUMN dengan aset terbesar mencapai hampir dua kuadriliun rupiah, sebenarnya telah berkomitmen untuk mengurangi pembiayaan batu bara. Dalam laporan tahunannya, Bank Mandiri juga menyampaikan tidak akan membiayai proyek yang membahayakan lingkungan. Meski demikian, Bank Mandiri masih memberikan pembiayaan proyek terkait batu bara. Misalnya menyalurkan pembiayaan ke salah satu proyek milik grup Adaro di Kalimantan Utara. Bank Mandiri berdalih bahwa mereka menjalankan pembiayaan batu bara, termasuk PLTU, dengan bergantung pada “kebijakan pemerintah.” Pembiayaan Bank Mandiri merupakan salah satu wujud “mengisi kekosongan” dari lubang yang diciptakan akibat minimnya bank internasional yang mau mendanai proyek Adaro. Bank internasional seperti Standard Chartered bahkan telah menyatakan akan mengakhiri pembiayaan mereka ke Adaro.

Komitmen bank nasional yang lemah sejalan dengan komitmen pemerintah yang juga lemah dalam melaksanakan transisi energi. Salah satunya tergambar dengan masih diberikannya ruang fiskal melalui “penghijauan” PLTU.

---

56 Lihat Rainforest Action Network, *et.al.*, “Banking on Climate Chaos: Fossil Fuel Finance Report 2023,” diakses dari [https://www.banktrack.org/download/banking\\_on\\_climate\\_chaos\\_2023/bocc\\_2023\\_0627.pdf](https://www.banktrack.org/download/banking_on_climate_chaos_2023/bocc_2023_0627.pdf).

# Kelompok 1% Di Balik Raksasa-Raksasa Batu Bara Indonesia



Layaknya banyak negara lain, negara Indonesia dijangkiti oleh ketimpangan ekonomi yang kian tajam. Dalam dua dekade terakhir, kesenjangan antara kelompok terkaya dan masyarakat di Indonesia pada umumnya semakin besar tumbuh lebih cepat dibandingkan negara lain di Asia Tenggara.<sup>57</sup> Empat orang terkaya di Indonesia kini memiliki kekayaan lebih banyak dibandingkan 100 juta penduduk termiskin.<sup>58</sup> Orang-orang terkaya ini, atau yang dapat diklasifikasikan sebagai kelompok elite 1% atau oligarki Indonesia ini telah lama teridentifikasi meraup kekayaan mereka berkat industri batu bara.<sup>59</sup>

Sebagai sebuah lini bisnis, bagaimana industri batu bara beroperasi demi meraup untung untuk segelintir pihak juga sudah sejak lama teridentifikasi daya rusaknya oleh banyak pihak. Mulai dari dampak ekologis hingga sosial. Perusahaan batu bara tidak berkegiatan di dalam ruang hampa dan jauh dari apa yang dapat dikatakan sebagai *business as usual*. Di Indonesia, mereka memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan-kebijakan negara. Dalam konteks hambatan terhadap *coal phase-out* di beberapa negara yang masih melakukan ekspansi batu bara seperti Indonesia, sebuah riset mengidentifikasi bahwa elite dan perusahaan batu bara memengaruhi keputusan politik secara signifikan melalui berbagai cara, salah satunya dengan *lobbying*.<sup>60</sup>

Dengan demikian, memetakan individu-individu di balik raksasa-raksasa batu bara Indonesia yang bukan hanya diuntungkan oleh bisnis energi kotor tetapi berpotensi menghambat kebijakan-kebijakan pro transisi energi bersih menjadi langkah awal guna mencari solusi serius untuk dekarbonisasi energi. Misalnya, melihat apakah terdapat *politically exposed persons* yang terafiliasi dengan perusahaan batu bara, maupun melihat apakah terdapat individu yang pernah dicatat di dalam *Offshore Leaks* karena keterkaitannya dengan perusahaan di negara suka pajak (*tax haven*). Negara suka pajak terkenal memiliki rezim hukum yang lemah sehingga kerap memfasilitasi pengemplangan pajak atau kejahatan finansial lainnya (umumnya disebut dengan *secrecy jurisdiction*).

---

57 Lihat Luke Gibson, Oxfam International, "Towards a More Equal Indonesia: How the government can take action to close the gap between the richest and the rest," Februari 2017, diakses dari <https://www.oxfam.org/en/research/towards-more-equal-indonesia>.

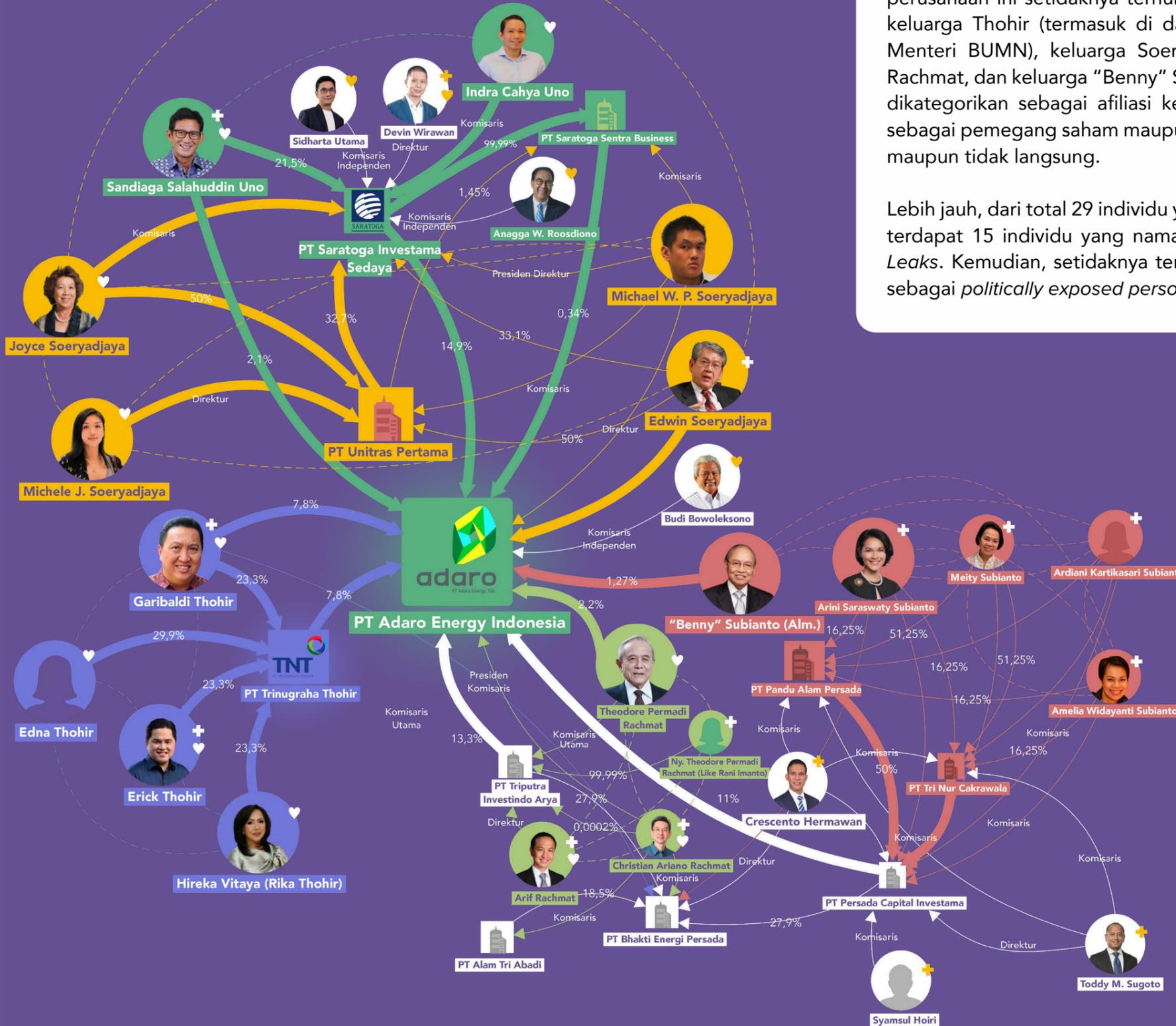
58 *Ibid.*

59 Lihat misalnya Viriya Singgih, Project Multatuli, "Unearthing Indonesia's 10 Biggest Coal Oligarchs," 2022, diakses dari <https://projectmultatuli.org/en/unearthing-indonesias-10-biggest-coal-oligarchs/>. Lihat juga Egi Primayogha, *et.al.*, Indonesia Corruption Watch, "Siapa Di Balik Pembangkit Listrik?", 2020, diakses dari <https://antikorupsi.org/id/article/siapa-di-balik-proyek-pembangkit-listrik>.

60 Lihat misalnya Nils Ohlendorf, *et.al.*, "The political economy of coal phase-out: Exploring the actors, objectives, and contextual factors shaping policies in eight major coal countries," *Energy Research & Social Science*, Vol. 90, 2022.



# Adaro



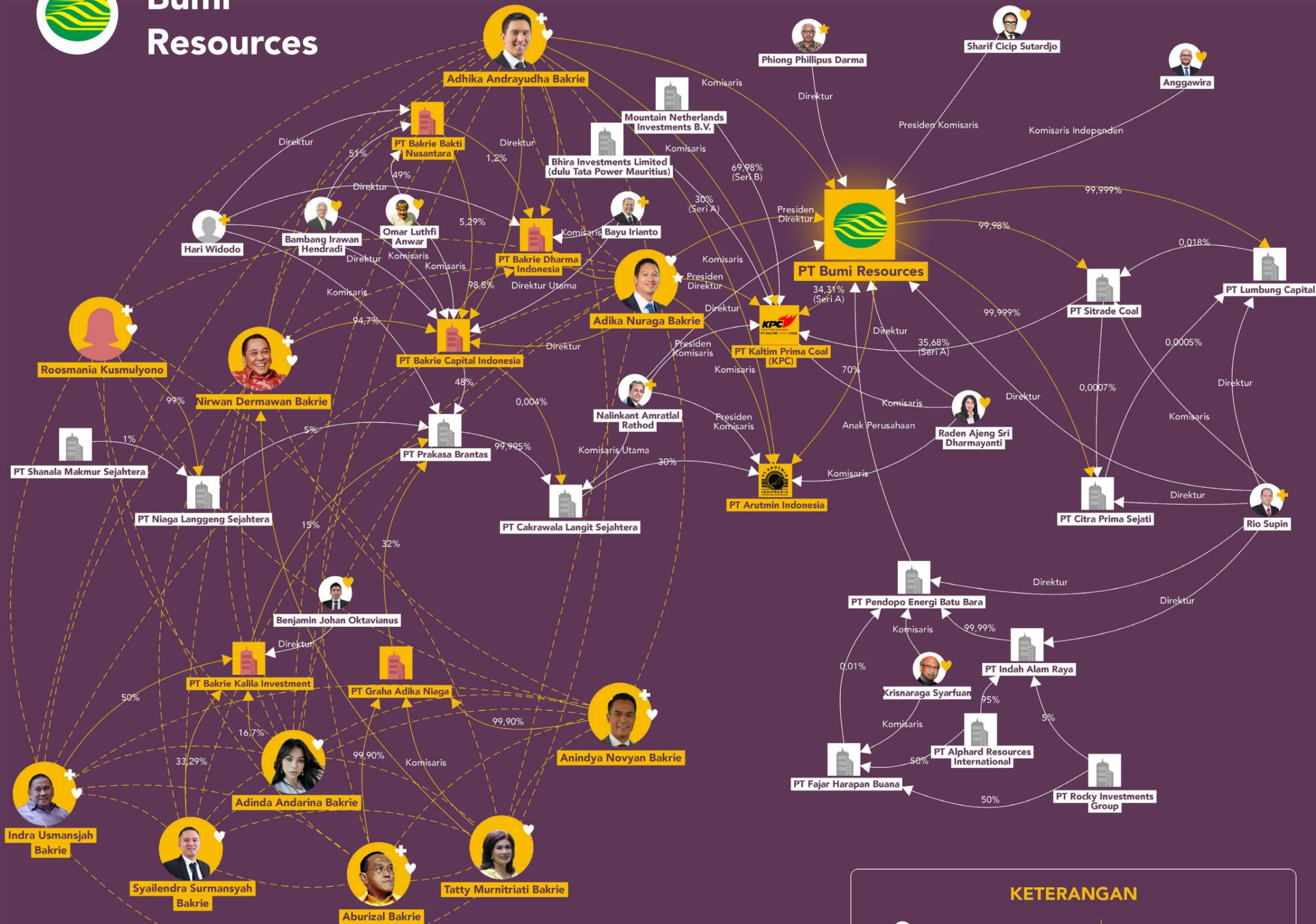
Berdasarkan penelusuran terhadap rantai afiliasi PT Adaro Energy Indonesia, perusahaan ini setidaknya terhubung dengan 5 (lima) keluarga taipan besar: keluarga Thohir (termasuk di dalamnya Erick Thohir yang juga merupakan Menteri BUMN), keluarga Soeryadjaya, keluarga Uno, keluarga Theodore Rachmat, dan keluarga "Benny" Subianto (Alm.). Sejumlah individu yang dapat dikategorikan sebagai afiliasi keluarga dari lima keluarga tersebut tercatat sebagai pemegang saham maupun pengurus dari Adaro, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Lebih jauh, dari total 29 individu yang terafiliasi dengan grup Adaro, sedikitnya terdapat 15 individu yang nama identiknya pernah tercatat dalam *Offshore Leaks*. Kemudian, setidaknya terdapat 15 individu yang dapat dikategorikan sebagai *politically exposed person*.

## KETERANGAN

- Individu
- Perusahaan
- Persentase Kepemilikan Saham/Posisi di Perusahaan
- Afiliasi Keluarga
- Politically Exposed Person
- Pernah Dicatat dalam Offshore Leaks
- Pernah Tersangkut Kasus Hukum

\*\*visualisasi lebih lengkap dari rantai afiliasi Adaro dapat dilihat di sini: <https://embed.kumu.io/83eb731bb41022e0bd01f9ebc5c86433>



\*visualisasi lebih lengkap dari rantai afiliasi Bumi Resources dapat dilihat di sini: <https://embed.kumu.io/2c709d1f1bcdae47c99b2ba4cd3c9c31>

### KETERANGAN

	Individu		Politically Exposed Person
	Perusahaan		Pernah Dicitat dalam Offshore Leaks
	Persentase Kepemilikan Saham/Posisi di Perusahaan		Pernah Tersangkut Kasus Hukum
	Afiliasi Keluarga		

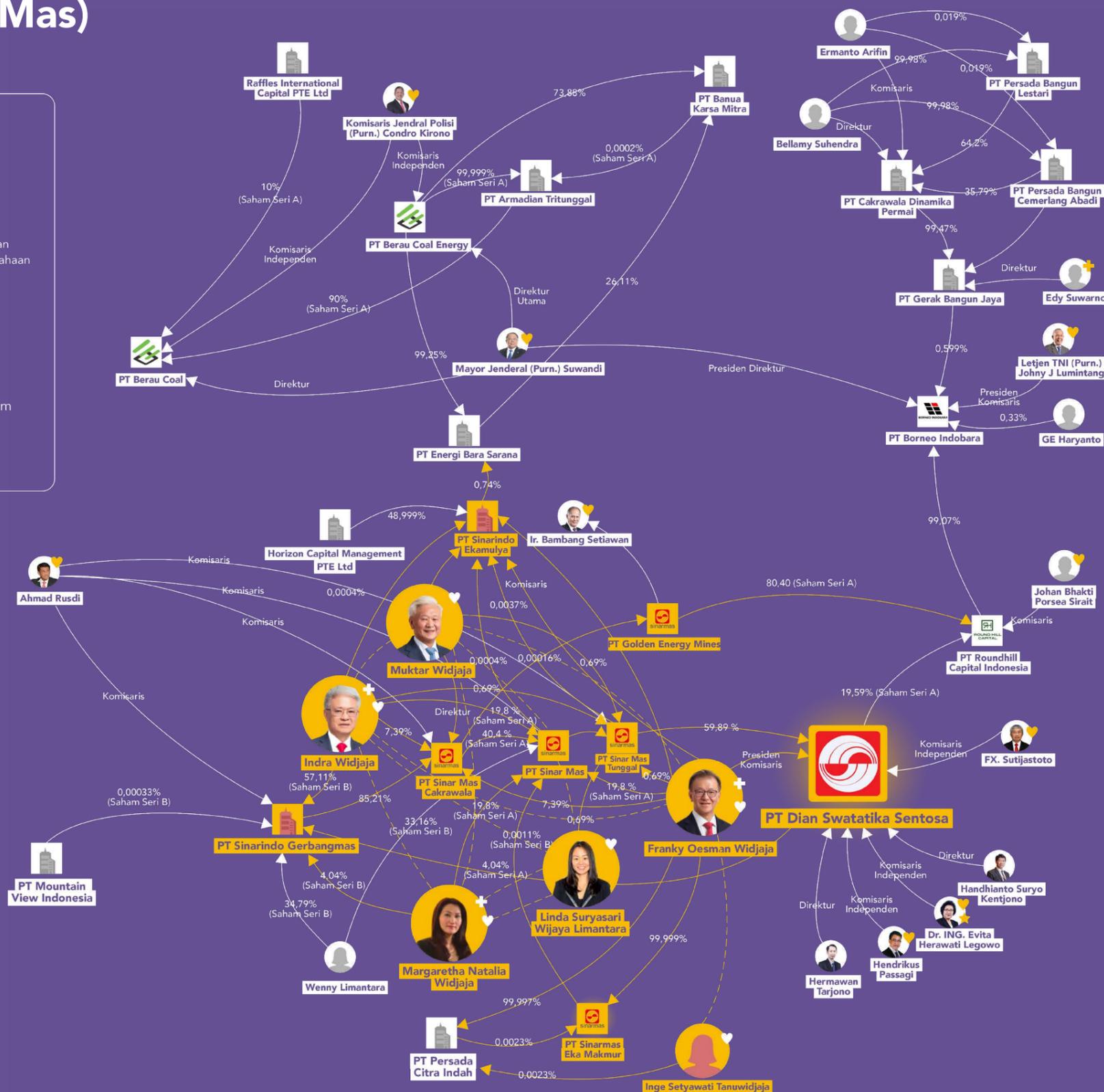
Sepanjang rantai bisnis PT Bumi Resources, dapat teridentifikasi terdapat sedikitnya 10 (sepuluh) anggota keluarga Bakrie (termasuk Aburizal Bakrie sendiri) yang terafiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk kepemilikan saham ataupun jabatan kepengurusan. Secara spesifik, dari total 44 individu yang terpetakan terafiliasi dengan PT Bumi Resources, sedikitnya terdapat 10 individu yang nama identiknya ditemukan dalam *Offshore Leaks*. Selain itu, 17 individu dari total 44 individu yang terafiliasi dengan PT Bumi Resources masuk ke dalam kategori *politically exposed person*.

Terakhir, terdapat 2 individu yang masuk ke dalam kategori "Pernah Tersangkut Kasus Hukum" menurut laporan ini. Individu pertama dari kategori ini adalah Adika Nuraga Bakrie. Keponakan dari Aburizal Bakrie sekaligus Presiden Direktur dari PT Bumi Resources ini pernah dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan keterangan sebagai saksi di kasus penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2022. Namun, Adika tidak memenuhi panggilan dari KPK tersebut.

Individu kedua, Phiong Phillipus Darma, yang tercatat sebagai direktur dari PT Bumi Resources, pernah dilaporkan ke Kepolisian Daerah Metro Jaya atas dugaan pemalsuan surat pada tahun 2010. Setelah dua kali tidak memenuhi surat panggilan dari kepolisian, nama Phiong Phillipus Darma sempat dimasukkan dalam daftar pencarian orang dan bahkan masuk dalam kategori red notice dari Interpol.

**KETERANGAN**

- Individu
- Perusahaan
- Persentase Kepemilikan Saham/Posisi di Perusahaan
- - - Afiliasi Keluarga
- 
- ♥ Politically Exposed Person
- ✚ Pernah Dicatat dalam Offshore Leaks
- ★ Pernah Tersangkut Kasus Hukum



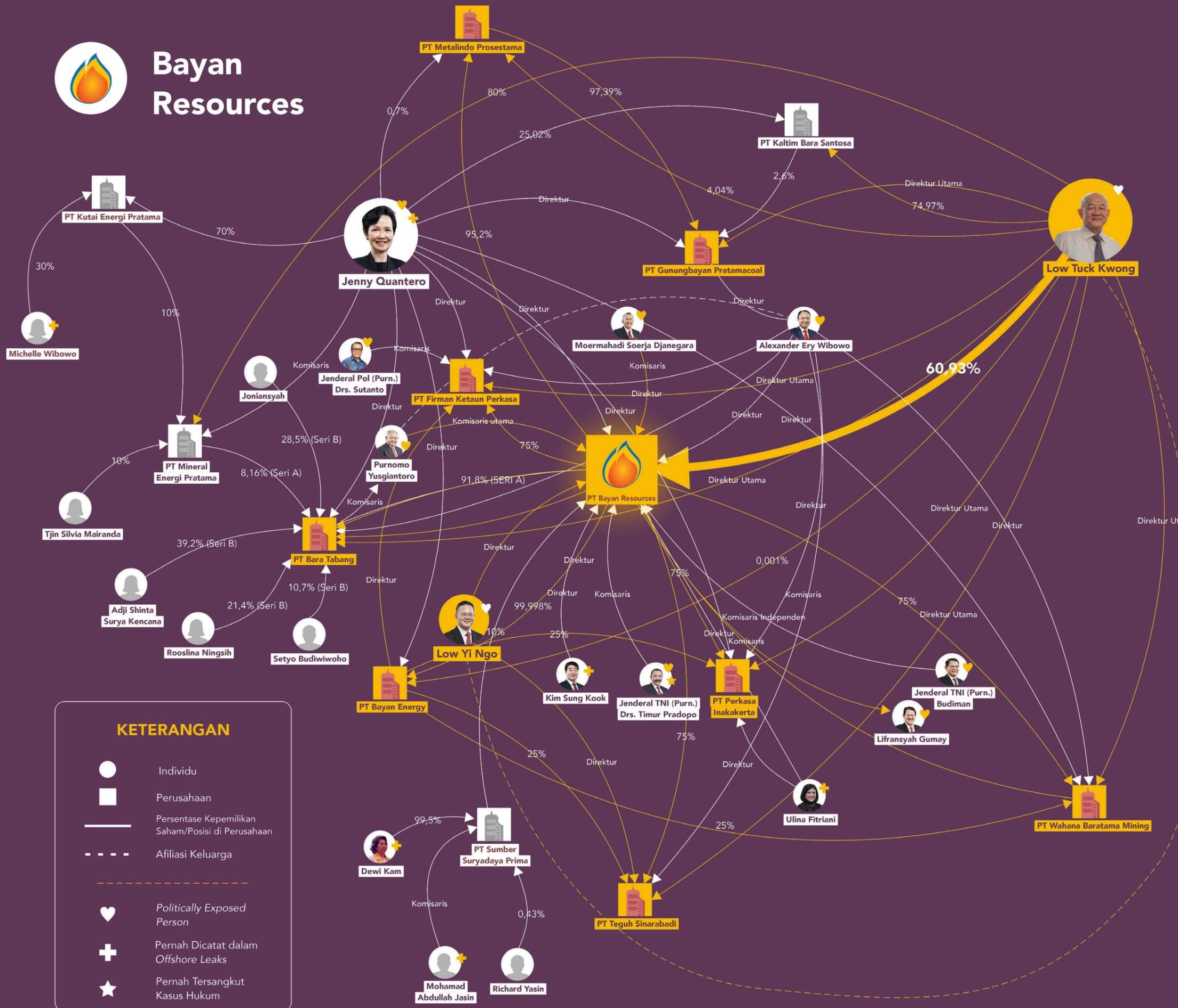
PT Dian Swatatika Sentosa (DSSA) sebagai salah satu perusahaan yang beroperasi di bawah grup Sinar Mas terhubung dengan keluarga konglomerat Widjaja. Dari rantai afiliasi yang dapat ditelusuri laporan ini, setidaknya terdapat 6 (enam) individu yang dapat dikonfirmasi memiliki afiliasi keluarga dengan keluarga Widjaja. Mereka memiliki peran sebagai pemegang saham maupun pengurus. Baik itu secara langsung maupun tidak langsung.

Dari total 54 individu yang terafiliasi dengan DSSA, laporan ini menemukan sedikitnya 4 (empat) individu nama identiknya tercatat dalam *Offshore Leaks*. Selain itu, dari total 54 individu yang terafiliasi dengan DSSA, setidaknya 16 individu merupakan *politically exposed person*.

Terakhir, terdapat satu individu yang masuk ke dalam kategori "Pernah Tersangkut Kasus Hukum" menurut laporan ini. Nama itu adalah Evita Herawati Legowo. Saat ini, ia memegang jabatan sebagai komisaris independen dari DSSA. Sebelumnya, ia pernah menjadi Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sebelum pensiun pada Desember 2012. Pada 20 September 2023, Evita pernah dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diminta keterangannya sebagai saksi pada kasus korupsi terkait pengadaan *Liquefied Natural Gas* (LNG) di PT Pertamina pada tahun 2011–2021.

\*visualisasi lebih lengkap dari rantai afiliasi DSSA dapat dilihat di sini: <https://embed.kumu.io/914c573c2825a35a5ac0415e01b7699f>

# Bayan Resources



Grup Bayan Resources dikuasai oleh konglomerat dan orang ketiga terkaya di Indonesia versi majalah Forbes tahun 2023, Low Tuck Kwong. Tercatat setidaknya satu individu yang terafiliasi dengan Dato' Low Tuck Kwong dalam hubungan keluarga, yakni Low Yi Ngo, yakni anak Low Tuck Kwong sekaligus direktur dari PT Bayan Resources.

Berdasarkan penelusuran rantai afiliasi PT Bayan Resources, laporan ini menemukan setidaknya ada 33 individu yang terhubung dengan perusahaan ini secara langsung maupun tidak langsung melalui kepemilikan saham ataupun kepengurusan. Dari total 33 tersebut, 6 (enam) individu diantaranya pernah tercatat dalam *Offshore Leaks*. Kemudian dari 33 total individu, sedikitnya 10 orang dapat dikategorikan sebagai *politically exposed person*.

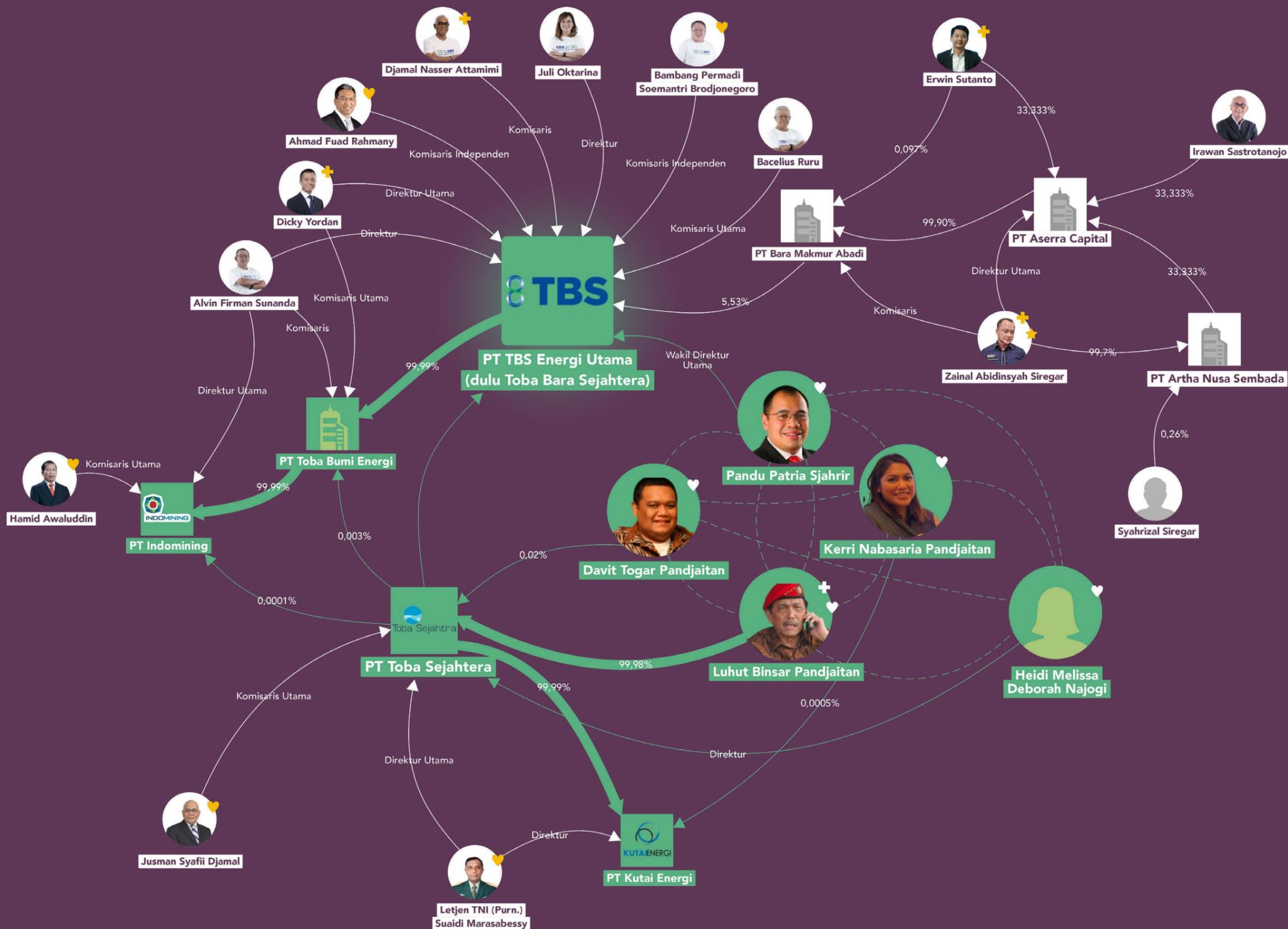
Satu individu yang terhubung dengan PT Bayan Resources masuk ke dalam kategori "Pernah Tersangkut Kasus Hukum" menurut laporan ini. Individu tersebut adalah Jenderal Polisi (Purn.) Timur Pradopo, yang saat ini menjabat sebagai komisaris dari PT Bayan Resources. Timur Pradopo pernah menduduki posisi sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dari tahun 2010–2013. Pada tahun 2003, Timur Pradopo pernah tiga kali dipanggil dan diminta memberikan keterangan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terkait kasus dugaan pelanggaran HAM berat pada tragedi Semanggi dan Trisakti yang terjadi di tahun 1998. Namun, Timur Pradopo tidak pernah memenuhi panggilan tersebut.

\*visualisasi lebih lengkap dari rantai afiliasi Bayan Resources dapat dilihat di sini: <https://embed.kumu.io/40306a6438afc2480588ec5f21231470>



# TBS Energi Utama

\*visualisasi lebih lengkap dari rantai afiliasi TBS Energi Utama dapat dilihat di sini:  
<https://embed.kumu.io/b95821cb46c2ce10f7f7f860ac123022>



Berdasarkan penelusuran rantai afiliasi terhadap PT TBS Energi Utama, ditemukan bahwa Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, masih terafiliasi dengan perusahaan ini melalui kepemilikan sahamnya secara mayoritas di PT Toba Sejahtera. Teridentifikasi pula setidaknya 4 (empat) individu yang memiliki afiliasi keluarga dengan Luhut. Mereka terhubung dengan PT TBS Energi Utama baik melalui kepengurusan ataupun kepemilikan saham secara langsung ataupun tidak langsung.

Secara lebih detail, penelusuran rantai afiliasi terhadap PT TBS Energi Utama menemukan setidaknya terdapat 23 individu yang terafiliasi baik melalui kepemilikan saham maupun kepengurusan secara langsung atau tidak langsung. Dari total 23 individu tersebut, 5 (lima) diantaranya pernah tercatat dalam *Offshore Leaks*. Kemudian, dari total 23 individu yang terafiliasi dengan PT TBS Energi Utama, 10 individu dapat dikategorikan sebagai *politically exposed person*.

Terakhir, terdapat satu individu yang masuk ke dalam kategori "Pernah Tersangkut Kasus Hukum" menurut laporan ini. Individu tersebut adalah Zainal Abidinsyah Siregar. Zainal terhubung dengan PT TBS Energi Utama melalui posisinya sebagai Direktur Utama di PT Aserra Capital dan sebagai Komisaris di PT Bara Makmur Abadi. Pada 28 November 2022, ia dilaporkan ke Mabes Polri di Jakarta atas dugaan pemalsuan dokumen dan penyerobotan lahan.



# Kesimpulan & Rekomendasi

## Kesimpulan & Rekomendasi

Di tengah tren global yang mencoba untuk meninggalkan energi kotor bernama batu bara, dapat terlihat melalui laporan ini bahwa industri batu bara justru masih mendapat sokongan luar biasa, baik secara politik maupun secara ekonomi.

Secara politik, ekosistem regulasi maupun tata kelola yang diciptakan pemerintah sangat mengakomodir kepentingan industri batu bara. Melalui berbagai skema, terdapat kesan kuat bahwa pemerintah Indonesia justru memberikan insentif besar untuk mempertahankan ketergantungan sumber energi Indonesia dengan batu bara.

Secara ekonomi, sejumlah lembaga keuangan seperti bank terbukti memiliki andil besar untuk memperpanjang nafas industri batu bara melalui suntikan dana dengan jumlah yang tidak sedikit. Melalui berbagai bentuk sokongan finansial, sejumlah bank (termasuk bank BUMN) justru melanggar komitmen internal mereka sendiri untuk mendorong pembiayaan yang berkelanjutan karena masih membiayai salah satu industri paling destruktif terhadap keberlanjutan ekosistem dan iklim.

Transisi energi bersih yang berkeadilan semakin jauh dari gapaian apabila jika melihat bagaimana individu-individu di balik perusahaan batu bara terbesar di Indonesia merupakan bagian dari kelompok 1% yang merupakan elite kaya dengan pengaruh besar terhadap lanskap pemerintahan Indonesia. Ini tergambar salah satunya dengan melihat bahwa setidaknya 89 individu yang terpetakan dari tujuh perusahaan batu bara pada laporan ini merupakan *politically exposed persons*. Dengan pengaruh yang mereka miliki, dan dikombinasikan dengan keuntungan yang selama ini mereka dapatkan dari industri

batu bara, ada potensi besar bahwa individu-individu tersebut punya kepentingan untuk “menunda” proses transisi energi di Indonesia yang hendak secara serius meninggalkan batu bara.

Dengan demikian, laporan ini merekomendasikan:

- 1 **Bank dan lembaga keuangan lainnya** di Indonesia harus memiliki komitmen kuat terhadap *Paris Agreement* dengan berhenti membiayai industri batu bara;
- 2 **Perusahaan batu bara** untuk berhenti Perusahaan batu bara untuk berhenti melakukan ekspansi proyek terkait batu bara dalam bentuk apapun, termasuk PLTU;
- 3 **Pemerintah** untuk serius melakukan dekarbonisasi sektor energi dan tidak lagi mendorong ekspansi terkait batu bara, termasuk dengan tidak lagi mengizinkan pembangunan PLTU *Captive*;
- 4 **Pemerintah** untuk tidak lagi melakukan segala bentuk *greenwashing* dan *climate delay* dalam regulasi maupun kebijakan investasi di Indonesia;
- 5 **Pemerintah**, sebagai anggota penuh ke-40 dari FATF, untuk tunduk sepenuhnya terhadap Rekomendasi 12 dan 22 tentang *politically exposed persons* yang tertuang dalam dokumen panduan FATF. Salah satunya dengan mengimplementasikan kebijakan dan/atau regulasi yang mewajibkan lembaga keuangan agar memiliki *risk management systems* yang jauh lebih komprehensif dari *customer due diligence* pada umumnya terkait *beneficial owners* dan *politically exposed persons* ketika/saat akan berhubungan bisnis dengan perusahaan lain;
- 6 **Masyarakat** sebagai nasabah untuk turut mendesak bank dan lembaga keuangan lainnya agar tidak lagi membiayai perusahaan batu bara.

# Lampiran

## Rincian Daftar Akta Perusahaan (Profil) yang Dirujuk Pada Laporan Ini

No.	Nama Perusahaan	Waktu Pengaksesan Profil dari <a href="https://ahu.go.id/">https://ahu.go.id/</a>	Tanggal Akta
1.	PT Adaro Energy Indonesia	23 Agustus 2023	22 Mei 2023
2.	PT Merdeka Copper Gold	15 Mei 2024	27 Maret 2024
3.	PT Pandu Alam Persada	4 September 2023	10 Februari 2022
4.	PT Alam Tri Abadi	27 September 2023	20 September 2021
5.	PT Trinugraha Thohir	24 Agustus 2023	10 Maret 2021
6.	PT Saratoga Investama Sedaya	15 Mei 2024	21 April 2022
7.	PT Saratoga Sentra Business	4 September 2023	19 Desember 2022
8.	PT Tri Nur Cakrawala	4 September 2023	10 Februari 2022
9.	PT Triputra Investindo Arya	4 September 2023	15 September 2021
10.	PT Bhakti Energi Persada	27 September 2023	15 November 2022
11.	PT Persada Capital Investama	24 Agustus 2023	10 Februari 2022
12.	PT Unitras Pertama	4 September 2023	22 Juni 2020
13.	PT Fajar Harapan Buana	27 September 2023	2 Agustus 2023

14.	PT Indah Alam Raya	27 September 2023	27 Mei 2022
15.	PT Prakarsa Brantas	27 Mei 2024	13 Agustus 2021
16.	PT Kaltim Prima Coal (KPC)	27 Mei 2024	14 Desember 2023
17.	PT Niaga Langgeng Sejahtera	27 Mei 2024	21 Agustus 2023
18.	PT Bakrie Kalila Investment	27 Mei 2024	1 Agustus 2022
19.	PT Shanala Makmur Sejahtera	27 Mei 2024	16 Desember 2021
20.	PT Citra Prima Sejati	27 September 2023	8 Juli 2022
21.	PT Lumbung Capital	26 September 2023	16 Juni 2022
22.	PT Bakrie Dharma Indonesia	26 Mei 2024	25 Januari 2023
23.	PT Arutmin Indonesia	15 Mei 2024	5 Februari 2024
24.	PT Sitrade Coal	26 September 2023	22 Juni 2022
25.	PT Graha Adika Niaga	27 Mei 2024	15 November 2023
26.	PT Bakrie Bakti Nusantara	27 Mei 2024	21 Desember 2023
27.	PT Bakrie Capital Indonesia	27 Mei 2024	21 Desember 2023
28.	PT Cakrawala Langit Sejahtera	15 Mei 2024	7 November 2023
29.	PT Pendopo Energi Batu Bara	21 September 2023	27 Januari 2022

30.	PT Bumi Resources	23 Agustus 2023	30 Juni 2023
31.	PT Giri Jaya Sentosa	5 September 2023	8 Mei 2023
32.	PT Mohammad Mangkuningrat	7 September 2023	19 Juni 2023
33.	PT Trifekta Multi Investama	7 September 2023	8 April 2022
34.	PT Indika Mitra Energi	4 September 2023	24 November 2021
35.	PT Kawarna Investama	7 September 2023	8 April 2022
36.	PT Kideco Jaya Agung	6 September 2023	27 Maret 2023
37.	PT Teladan Resources	4 September 2023	9 Februari 2022
38.	PT Indika Energy	23 Agustus 2023	19 April 2023
39.	PT Multi Tambangjaya Utama	27 September 2023	31 Maret 2022
40.	PT Basis Utama Prima	7 September 2023	16 Juni 2023
41.	PT Indika Inti Corpindo	6 September 2023	28 Mei 2021
42.	PT Wahana Investindo Nusantara	7 September 2023	8 April 2022
43.	PT Indika Inti Investindo	5 September 2023	16 Agustus 2022
44.	PT Indika Inti Mandiri	5 September 2023	11 April 2023
45.	PT Indika Indonesia Resources	27 September 2023	23 Agustus 2023
46.	PT Kencana Khatulistiwa Prima	5 September 2023	17 Juli 2023

47.	PT Mitra Energi Agung	27 September 2023	20 Mei 2021
48.	PT Binar Mitra Prima	7 September 2023	28 Oktober 2022
49.	PT Indika Inti Holdiko	5 September 2023	30 Desember 2022
50.	PT Indira Investindo	7 September 2023	8 April 2022
51.	PT Teladan Pusaka	7 September 2023	8 April 2022
52.	PT Toba Sejahtera	24 Agustus 2023	30 Maret 2022
53.	PT Kutai Energi	15 Mei 2024	2 Mei 2024
54.	PT Indomining	5 September 2023	28 Juni 2023
55.	PT TBS Energi Utama	23 Agustus 2023	3 Maret 2023
56.	PT Bara Makmur Abadi	25 Agustus 2023	23 Maret 2022
57.	PT Aserra Capital	25 Agustus 2023	29 Agustus 2019
58.	PT Artha Nusa Sembada	5 September 2023	8 September 2022
59.	PT Toba Bumi Energi	5 September 2023	5 Juli 2023
60.	PT Dian Swastatika Sentosa	21 September 2023	6 Oktober 2022
61.	PT Cakrawala Dinamika Permai	2 Oktober 2023	23 Agustus 2023
62.	PT Sinarmas Eka Makmur	25 Agustus 2023	8 Agustus 2023
63.	PT Persada Bangun Lestari	4 Oktober 2023	7 Juli 2023
64.	PT Berau Coal	5 September 2023	15 Agustus 2022

65.	PT Persada Citra Indah	6 September 2023	27 Maret 2023
66.	PT Sinar Mas	23 Agustus 2023	14 April 2023
67.	PT Armadian Tritunggal	7 September 2023	20 Juni 2023
68.	PT Borneo Indobara	21 September 2023	26 Juni 2023
69.	PT Golden Energy Mines	21 September 2023	22 November 2022
70.	PT Banua Karsa Mitra	7 September 2023	20 Juni 2023
71.	PT Sinar Mas Cakrawala	6 September 2023	10 Agustus 2023
72.	PT Berau Coal Energy	23 Agustus 2023	31 Oktober 2022
73.	PT Roundhill Capital Indonesia	4 Oktober 2023	22 November 2022
74.	PT Persada Bangun Cemerlang Abadi	4 Oktober 2023	7 Juli 2023
75.	PT Gerak Bangun Jaya	2 Oktober 2023	14 Januari 2022
76.	PT Sinarindo Gerbangmas	6 September 2023	14 April 2023
77.	PT Sinarindo Ekamulya	5 September 2023	22 Juli 2022
78.	PT Energi Bara Sarana	5 September 2023	20 Juni 2023
79.	PT Sinar Mas Tunggal	5 September 2023	6 Maret 2023
80.	PT Perkasa Inakakerta	2 Oktober 2023	3 Oktober 2022
81.	PT Kaltim Bara Santosa	28 Mei 2024	23 Juli 2021
82.	PT Teguh Sinarabadi	28 Mei 2024	18 Desember 2023

83.	PT Firman Ketaun Perkasa	4 Oktober 2023	3 Oktober 2022
84.	PT Wahana Baratama Mining	26 September 2023	3 Oktober 2022
85.	PT Bara Tabang	28 Mei 2024	3 Januari 2024
86.	PT Kutai Energi Pratama	28 Mei 2024	20 November 2023
87.	PT Metalindo Prosestama	28 Mei 2024	23 September 2021
88.	PT Bayan Resources	23 Agustus 2023	27 April 2023
89.	PT Sumber Suryadaya Prima	4 September 2023	30 November 2022
90.	PT Mineral Energi Pratama	28 Mei 2024	29 April 2024
91.	PT Gunungbayan Pratamacoal	4 Oktober 2023	23 Februari 2022

2024

